

MAKNA KEHIDUPAN MANUSIA MENURUT ALBERT CAMUS

Oleh

Astri Adriani Allien

Pengajar Jurusan Sastra Inggris

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Albert Camus is an important figure in the history of French literature with his main themes, absurdity and suicide. Using the method of intertextuality, this paper analyses Camus' thoughts on the absurd meaning of life portrayed through the character Mersault in his work L'Etranger. It is then found that this work carries the same philosophical ideas of absurdity as found in his famous essay Le Mythe de Sysiphe, and make those ideas more easily understood. The difference between those two works is just of genre.

Keywords: *Albert Camus, L'Etranger, intertextuality, absurdity*

A. PENDAHULUAN

Kesusasteraan Prancis telah berlangsung melalui proses kesejarahan yang sangat panjang. Dalam masa tersebut muncul berbagai aliran dan paham yang tidak selalu sama. Perbedaan paham menimbulkan aliran yang berbeda pula karena adanya perbedaan pandangan dunia pengarang dan selalu berubah sesuai zamannya. Hampir setiap kelahiran generasi baru dalam kesusasteraan akan lahir pula pandangan dunia yang baru pula sedangkan pandangan dunia yang baru biasanya berakar dari generasi sebelumnya. Tidak jarang pula perubahan yang terjadi merupakan pemberontakan

dari generasi sebelumnya. Pemberontakan inilah yang biasanya melahirkan gaya yang menjadi ciri khas seorang pengarang.

Albert Camus, salah seorang penulis Prancis, menggunakan cara berbeda dengan pendahulunya yang berasal dari abad kesembilan belas. Apabila pengarang pada abad sebelumnya dikenal sebagai pengarang-pengarang tradisional seperti Honoré de Balzac, Gustave Flaubert maupun Emile Zola maka Camus mengenalkan paham yang berbeda. Penolakannya terhadap kesejarahan melahirkan satu paham baru dalam kesusasteraan yang menjadi dasar bagi Camus dalam menciptakan karya-karyanya.

L'Etranger adalah salah satu novel karya Albert Camus yang berhasil membuat penulis tersebut dikenal di seluruh dunia. Novel tersebut telah diterjemahkan ke dalam dua puluh lima bahasa dan dianggap sebagai dokumen penting perjalanan sejarah kesusasteraan Eropa. Tidaklah mengherankan apabila pada tahun 1957 Akademi Swedia menganugerahinya hadiah Nobel dalam bidang kesusasteraan. Dalam kehidupannya yang relatif pendek Camus (1913-1960) telah berhasil menuangkan pemikiran filosofisnya melalui beberapa esai, drama, kumpulan cerpen maupun novel seperti *l'Envers et l'Endroit* (1937), *Noces* (1938), *l'Etranger* (1941), *Le Mythe de Sysiphe* (1943), *La Peste* (1947), *l'Homme Revolté* (1951), *La Chute* (1956), dan sebagainya. Melalui *l'Etranger* Camus berhasil mengungkapkan kegelisahan manusia pada masa itu yang diakibatkan oleh budaya barat yang mekanis (Fitch, 1972:11).

Pernyataan Camus bahwa novel *l'Etranger* baru akan mendapatkan nyawa setelah esainya *Le Mythe de Sysiphe* dibaca (Maurois, 1972:332) menunjukkan adanya hubungan intertekstualitas antara keduanya. Dengan demikian analisis ini akan menggunakan konsep intertekstualitas.

Dengan melihat adanya hubungan intertekstual antara *l'Etranger* dan *le Mythe de Sysiphe* maka akan muncul permasalahan ide-ide apa yang terkandung dalam *le Mythe de Sysiphe* sehingga menjadi dasar pembacaan terhadap *l'Etranger*. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah absurditas manusia yang terkandung di dalam novel *l'Etranger* berdasarkan pembacaan terhadap esai *le Mythe de Sysiphe*.

Intertekstualitas merupakan kerja asosiasi yang kompleks agar makna karya sastra dapat ditemukan karena intertekstualitas merupakan fenomena yang mengarahkan pembacaan teks yang memungkinkan untuk menentukan interpretasi dan bukan hanya pembacaan per baris. Cara ini berguna untuk memandang teks sebagai penentu pembentukan makna wacana sehingga pembaca sadar bahwa kata-kata tidak mengacu pada benda atau konsep. Dalam hal ini kata-kata merupakan jalinan teks-teks yang telah dikenal maupun bagian-bagian teks yang muncul sehingga diketahui bahwa teks tersebut telah ada sebelum muncul dalam teks yang baru (Riffaterre dalam Worton dan Judith Still, 1993:627).

Esai Riffaterre mengenai intertekstualitas tidak hanya berhenti pada asumsi bahwa karya sastra tidak dihasilkan dalam kekosongan budaya dan untuk

memahaminya perlu dicari hubungannya dengan teks-teks lain (Riffaterre, 1978:23) saja tetapi berkembang subur melalui esai Julia Kristeva yang berjudul *Word, Dialogue, and Novel*. Dengan demikian, didapatkan asumsi dasarnya, yaitu bahwa setiap teks dibangun berdasar atas mosaik kutipan, penyerapan, dan transformasi dari teks lain yang telah ada (Kristeva, 1987:66), sehingga dalam setiap teks sastra terkandung pula teks lain yang secara tidak langsung menjadi acuan, kerangka, dan peneladanan. Oleh karena itu, pemahaman teks yang baru memerlukan latar belakang pengetahuan mengenai teks-teks yang mendahuluinya, karena sebuah karya sastra merupakan hasil kreativitas pengarang yang menafsirkan teks-teks yang ada sebelumnya sebagai mosaik-mosaik dan kemudian disusun sebagai sebuah karya baru sehingga terasa padu dan indah (Pradopo, 2002:228).

B. CAMUS, ABSURDITAS, DAN BUNUH DIRI

Pemikiran tentang kehidupan manusia yang dikemukakan oleh Camus melalui *le Mythe de Sysiphe* meliputi absurditas dan bunuh diri. Bagi Camus, bunuh diri merupakan salah satu jalan keluar dari absurditas karena rasa absurd tidak berada pada dunia atau pada manusia tetapi pada pertentangan antara kesadaran

manusia dan kenyataan dunia yang paling dalam. Pernyataan ... *Je tire l'absurd trois conséquence qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion. Par le seul jeu de ma conscience je transforme en règle de vie ce qui était une invitation à la mort-et je refuse le suicide* (Camus, 1942:14) sesungguhnya menegaskan bahwa pemberontakan, kebebasan, dan gairah jiwa merupakan jalan hidup untuk menolak bunuh diri. Kehidupan Sisifus (Sysiphe) yang harus berulang-ulang membawa batu di punggung mendaki bukit dan ia tahu bahwa batu tersebut akan jatuh kembali memberi kesadaran bahwa mata rantai kehidupan yang mekanis menyebabkan manusia memiliki kesadaran tentang pembebasan diri dari kehidupan tetapi bukan dengan cara bunuh diri. Dengan bekal kesadaran yang dimiliki itulah manusia kembali menjalani kehidupan dengan harapan dan gairah seperti Sisifus yang tidak pernah putus asa meski kerja kerasnya menggotong batu akan sia-sia.

Sebelum manusia bertemu dengan pengalaman absurd, ia hidup dengan penuh harapan dan idealisme yang akan runtuh begitu saja setelah menemui pengalaman absurd. Selanjutnya kesadaran tentang kehidupan yang ada di setiap saat akan timbul gairah. Kegairahan tersebut ditandai dengan adanya kesadaran tentang "saat" yang kemudian berkembang

menjadi kesadaran tentang urutan ‘saat-saat’. Kesadaran inilah yang merupakan absurd yang ideal (Camus, 1942:25-26).

Setelah mencapai tahapan tersebut akan berkembang sikap masa bodoh (*indifférence*). Sikap ini muncul karena manusia telah bebas dari segala aturan dan pilihan-pilihan yang mengikatnya sehingga manusia tidak perlu lagi memilih maupun menolak. Prinsip ini melahirkan rumusan baru bahwa segalanya diperbolehkan. Dalam tahap ini manusia absurd telah dibebaskan dari segala beban cita-cita dan harapan tentang masa depan. Ia boleh melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan dosa dan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Bahkan segala hal yang bersifat mungkin cukup diatasi oleh manusia. Manusia lari kepada Tuhan karena ia menganggap permasalahannya tidak mungkin diatasi sendiri (Camus, 1942:15). Penolakan terhadap campur tangan Tuhan karena segala hal yang berhubungan dengan Tuhan dianggap irrasional.

Pemikiran tentang absurditas sebagaimana tertuang dalam esai *le Mythe de Sysiphe* di atas terlihat dengan jelas pada sikap tokoh Mersault dalam novel *l'Etranger*. Mersault menjalani kehidupan pribadinya secara monoton dan mekanistik. Hari-harinya diawali dengan keberangkatan ke kantor di pagi hari dengan naik trem. Siang hari ia ke restoran

untuk makan siang. Pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak dan kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Malam hari ia pulang ke rumah dan tidur.

Kehidupannya monoton yang dijalani oleh Mersault membuat ia tidak memikirkan keinginan maupun cita-cita di masa mendatang. Kematian ibunya maupun rasa cinta kekasihnya, Marie, tidak mampu menyentuh perasaannya. Promosi jabatan yang ditawarkan oleh direktur ditolaknya. Bagi Mersault perubahan dalam hidup tidak akan pernah terjadi dan ia merasa cukup puas dengan kehidupan monoton yang dijalaninya sampai pada satu musibah yang menimpanya ketika ia bersama Marie, pacarnya serta teman-temannya melewati akhir pekan di pantai. Musibah tersebut terjadi begitu saja. Peristiwa diawali dengan terjadinya pertengkaran antara teman Mersault bernama Raymond dengan seorang Arab. Mersault terlibat dalam pertengkaran tersebut. Di bawah sinar matahari pantai yang menyilaukan mata dan ancaman pisau, secara refleks Mersault menarik pelatuk pistol yang dipegangnya dan terjadilah pembunuhan. Peristiwa tersebut membawa perubahan pada kehidupan Mersault... *J'ai compris que j'ai détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux* (Camus, 1957:95).

Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Mersault ditangkap dan dibawa ke penjara. Setelah ditahan selama satu tahun ia diajukan ke pengadilan. Di pengadilan, Mersault berhadapan dengan orang-orang yang berpendirian teguh pada prinsip kemasyarakatan seperti hakim, jaksa, dan pembela. Sebagai manusia yang polos (atau tak acuh?) Mersault tidak memahami proses pengadilan yang dijalaninya. Ia begitu saja mengemukakan kebenaran yang dipercayainya. Akibatnya Mersault dianggap membahayakan bagi masyarakat dan ia dijatuhi hukuman mati.

Selama berada di penjara Mersault melalui hari-harinya dengan memandangi langit sambil tiduran atau membaca potongan-potongan kertas koran yang dikumpulkannya dalam sebuah buku tua. Setelah dijatuhi hukuman mati timbul harapan-harapan pada diri Mersault. Ia berharap dapat terbebas dari hukuman mati dengan cara melarikan diri dari penjagaan para algojo. Harapan untuk mendapatkan pengampunan sebagaimana dialami oleh orang lain juga mulai muncul pada kesadaran Mersault.

Sebelum pelaksanaan hukuman mati, Mersault dikunjungi oleh seorang paderi. Paderi tersebut berusaha meyakinkan Mersault bahwa meskipun vonis mati sudah dijatuhkan pengadilan Mersault masih memikul dosa kepada Tuhan. Paderi juga berusaha memberi

harapan-harapan baru kepada Mersault tentang kehidupan di akhirat tetapi Mersault merasa bahwa tindakan paderi tersebut telah melampaui batas sehingga meledaklah kemarahan Mersault. Kemarahan tersebut merupakan wujud pemberontakan atas kesadaran tentang kenyataan yang harus ia hadapi. Ia bersedia menjalani hukuman dan tidak mau lebih dari itu.

Dengan kemarahannya yang meledak Mersault merasa telah bebas dari segala beban yang selama hidupnya ia rasakan sangat mengekang. Pemberontakan inilah yang kemudian melengkapi kedirian Mersault sebagai manusia absurd sejati. Dengan pemberontakan itu pula Mersault benar-benar menemukan kesadaran absurdnya kehidupan yang ia jalani selama hidup dan bagaimana ia harus bersikap dalam menjalani kehidupan yang absurd. Sejak saat itu pula Mersault merasa telah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, termasuk kematian yang akan dihadapinya. Bagi manusia absurd setiap saat dalam hidupnya sangat berarti, sebagaimana kata-kata Mersault berikut:

... Et moi aussi je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vide d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du

monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternal enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine (Camus, 1957:188).

“Dan aku juga, aku merasa siap untuk memulai hidupku yang baru. Seolah-olah kemarahanku telah membebaskanku dari segala derita dan membersihkan diri dari segala harapan. Di hadapan malam yang penuh dengan isyarat dan bintang-bintang, untuk pertama kali kubuka diriku bagi kemasabodohan dunia yang mesra. Untuk membuktikan bahwa begitu pula aku rasakan begitu dekatnya dan bersaudara. Kurasakan bahwa selama ini aku hidup bahagia dan sampai saat ini pun aku tetap merasa bahagia. Agar segalanya tercurahkan, agar aku tak merasa terlalu kesepian lagi, hanya satu yang kuharapkan, agar pada hari eksekusiku nanti akan berduyun-duyun orang datang menonton, dan mereka menyambutku dengan teriakan-teriakan kebencian.”

Sebelum perjumpaannya dengan pengalaman absurd, Mersault menjalani kehidupannya dengan monoton tanpa adanya kesadaran. Baru setelah berlangsungnya peristiwa pembunuhan yang diikuti oleh proses peradilan, ia mulai

mempertanyakan tentang nilai-nilai kehidupan. Tahap puncak sebagai manusia absurd sejati dicapai Mersault setelah ia diprovokasi oleh paderi dengan tuntutan-tuntutan dan harapan yang irasional. Peristiwa ini menyulut pemberontakannya yang membuktikan bahwa ciri-ciri manusia absurd sejati telah tercapai.

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ide-ide filosofis dalam esai *Le Mythe de Sysiphe* dihidupkan dalam novel *l'Etranger* sehingga lebih mudah dipahami. Dengan demikian tidak ada penentangan dalam meresepsi hipogramnya. Beda keduanya hanya terletak pada genrenya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Camus, Albert. 1942. *Le Mythe de Sysiphe: Essai sur l'Absurd*. Paris: Gallimard
- _____. 1957. *L'Etranger*. Paris: Gallimard
- Fitch, Brian T. 1972. *L'Etranger d'Albert Camus: Un Texte, Ses Lecteurs, Leurs Lecteurs*. Paris: Librairie Larousse.
- Kristeva, Julia. 1987. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Oxford: Basil Blackwell
- Maurois, André. 1972. *De Proust A Camus*. Paris: Bordas.

Pradopo, Rachmat Djoko. 2003.
Pengkajian Puisi. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
Riffaterre, Michael. 1978. *Semiotics of
Poetry*. Bloomington: Indiana
University Press

Worton, Michael dan Judith Still. 1993.
*Intertextuality: Theories and
Practices*. Manchester: Manchester
University Press.

KONSEP MAGNANIMITY SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM FILOSOFI PENDIDIKAN CHARLOTTE MASON

Oleh

Ellen Christiani Nugroho

Pengajar Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

It is desirable that education will result not only intelligence, but also noble character in students' personality. This desire should first have its base on strong philosophical answer for the question of why, i.e. why must we educate at all. We then must examine deeply our vision of education which will determine the course of our educational method and action. Charlotte Mason provides us with the concept of magnanimity as the desirable end result of character education. This concept embraces holistic aspects of education: the academic, the practical, the philosophical, and the spiritual. High thinking balanced with lowly living, wide interests on different kinds of subjects, a lifelong-lasting desire to learn are her some criteria of that desirable end result. She insists that educators should hold grand vision and aim as highest as possible, not merely limited by materialistic or utilitarian scheme of success. Education then will become more than a system, but a method, i.e. a flexible attempts to achieve substantially clear educational goal.

Keywords: *magnanimity, education, Charlotte Mason*

A. PENDAHULUAN

Dalam diskusi terbatas “Menggugat Praksis Pendidikan” yang diselenggarakan Harian KOMPAS dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 1 Mei 2012 lalu, dimunculkan pertanyaan: bagaimana mengubah kecenderungan umum kegiatan pendidikan yang selama ini cenderung menghasilkan manusia *kujana* (pintar, terampil, tetapi miskin

moral alias durjana) menjadi *sujana* (pintar, terampil, sekaligus arif-bijaksana). “Ilmu pengetahuan dan keterampilan idealnya berpuncak membentuk manusia berwatak, ” tulis St. Sularto dalam laporannya tentang diskusi itu. “Namun, yang terjadi sebaliknya. Praktik korupsi merajalela, ujian nasional perlu diawasi polisi, dan rasa keadilan masyarakat diabaikan.”

Ada lagi pernyataan keras dari praktisi dan pemerhati pendidikan Paul Suparno, SJ. Tanpa tedeng aling-aling beliau mengklaim, “Di Indonesia tidak ada filosofi pendidikan.” Pendapat itu ia keluarkan setelah menilik UU Sisdiknas yang tidak disertai penjelasan latar belakang pemikirannya (rationale). Masyarakat hanya disuruh menerima undang-undangnya, tanpa tahu mengapa undang-undang itu dirumuskan demikian.

Dari telaahnya, Suparno menyimpulkan bahwa mulai dari dokumen legal sampai praksisnya, pendidikan Indonesia didominasi oleh pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu pendekatan berpikir yang tak mepedulikan benar atau tidaknya visi, yang penting adalah ada tidaknya manfaat. Dalam hal ini, yang dijadikan patokan adalah manfaat dari segi politis dan praktis – manfaat bagi pihak penguasa dan manfaat bagi dunia industri serta pasar kerja. Wajar saja jika pendekatan semacam ini lantas menekankan keterampilan kejuruan belaka dengan mengesampingkan pembangunan karakter siswa. Aspek kognitif didewadewakan. Aspek nilai dan kebudayaan dibuang, atau setidaknya didangkalkan (menjadi sekedar hafalan?). Cita-cita pendidikan “manusia seutuhnya” hanya ada di awang-awang.

Situasi ini persis seperti yang digambarkan Charlotte Mason dalam volume bukunya yang pertama, *Home Education*: “berkabut dan muram, belum ada prinsip yang menyatukan, tujuan jelas belum dirumuskan, belum ada satu filosofi pendidikan, gonta-ganti cara, kegagalan, dan kekecewaan silih berganti yang menandai rekam jejak pendidikan kita”. Kita gelisah, tapi kita bingung harus memperbaiki dari mana. Ya, dari mana harus kita luruskan benang ruwet ini?

Tak bisa tidak, saran Charlotte. Kita harus lebih bersungguh-sungguh berupaya merumuskan filosofi pendidikan kita. “Sama seperti arus sungai tak akan lebih tinggi dari hulunya, upaya mendidik tidak akan bisa melampaui konsep pendidikan yang menjadi asal-usulnya.” (Vol. 1, hlm. i)

Merumuskan filosofi pendidikan itu adalah kerja yang sangat menantang. Kita punya banyak peneliti dan ilmuwan pendidikan, tetapi seberapa banyak dari mereka yang mumpuni sebagai filsuf? Filosofi tidak bisa dikerjakan dengan bahasa statistik atau program komputer. Filosofi selalu harus lahir dari pergulatan batin manusia menghadapi pertanyaan-pertanyaan hakiki – jenis pertanyaan yang mengandung hikmah di dalam dirinya sendiri, lepas dari sudah ditemukan atau belum jawabannya.

Dalam kegandrungan manusia modern pada sains, bermilyar-milyar rupiah digelontorkan untuk melakukan berbagai penelitian empiris tentang pendidikan. Tetapi seberapa serius kita mendukung orang-orang yang mau berpikir secara filosofis? Padahal filosofi merupakan alat penting untuk memperjernih visi yang mau kita capai. Tanpa filosofi pendidikan yang jelas, kita jadi seperti petani yang berupaya membajak sawah dengan mata terpaku kepada alat bajaknya, alih-alih ke titik imajiner di horizon sana yang seharusnya jadi patokannya untuk menghasilkan alur bajakan yang lurus. Rendahnya minat baca, kreativitas, etos kerja, sampai budi pekerti dari lulusan sekolah-sekolah kita menunjukkan bahwa merendahkan cita-cita pendidikan seringkali membuat kita tak berhasil memperoleh bahkan target yang paling minim sekalipun. Anak-anak kita sedang – dalam bahasa Charlotte – mengalami ‘malnutrisi spiritual’ karena sekolah-sekolah mengabaikan aspek hakiki dari diri mereka, hanya berkonsentrasi mencetak mereka menjadi pekerja dan pencari nafkah tanpa mendidik karakter mereka menjadi luhur.

Kita perlu lebih dulu menunjuk tegas ke arah satu tujuan akhir, baru kita bisa merancang upaya untuk sampai ke sana. “Gagal menemukan filosofi yang

menunjukkan tujuan dan cara mencapainya akan menghasilkan depresi, bahkan tindakan-tindakan gila. Kita mengutip adagium ini, motto itu, sepotong ide dari tempat lain lagi, menjadikannya satu koleksi carikan tambal sulam yang menyedihkan untuk menutupi ketelanjangan kita.” (Vol. 6, hlm. 334)

Cara terbaik mendekati filsafat, kata Jostein Gaarder dalam novelnya *Dunia Sophie*, adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kalau begitu, pertanyaan apa yang sebaiknya kita ajukan lebih dulu dalam upaya merumuskan filosofi pendidikan kita?

Saya mengutip satu alinea dari buku bagus David Hicks, *Norms and Nobility* (1999). Saya terjemahkan bebas demikian: “Pendidikan di setiap jenjangnya mencerminkan asumsi-asumsi dasar kita tentang hakikat manusia. Oleh karena itulah, tak satu sistem pendidikan pun yang bisa pura-pura bodoh dalam menyatakan sikap tentang apa itu manusia dan apa tujuan hidupnya. Seorang pemikir pendidikan yang gagal menegaskan pandangannya mengenai manusia dengan sendirinya mengundang polemik berkepanjangan. Dia mungkin menyelubungi premis-premisnya untuk memikat para pembaca yang mudah diperdaya lewat keterampilan menyusun argumen yang seolah logis. Sesungguhnya,

entah dia mau atau tidak mau, selalu ada asumsinya tentang hirarki nilai-nilai kemanusiaan. Keyakinannya tentang apa itu hakikat dan tujuan yang sepatutnya dikejar manusia akan menentukan resep yang ia rumuskan soal tujuan dan tugas pendidikan.”

Ingin memperbaiki situasi pendidikan Indonesia? Tariklah diri sejenak dari hiruk pikuk berbagai macam proyek, pelatihan, penelitian, dan segala macam kegiatan praksis. Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan-pertanyaan ini dan coba menjawabnya: “(Si)apa sebenarnya manusia Indonesia itu? Apa yang pantas menjadi tujuan hidupnya?” Tulisan ini hendak menggali konsep filosofi pendidikan Charlotte Mason tentang *magnanimity* sebagai tujuan akhir pendidikan karakter yang layak diburu oleh suatu sistem pendidikan.

B. PROFIL CHARLOTTE MASON

Charlotte Maria Shaw Mason (1842-1923) adalah tokoh pendidik progresif dari Inggris era Victoria. Dia pendidik yang berdedikasi, pemikir yang mumpuni, sekaligus penulis yang produktif. Ide-idenya berdampak besar pada pendidikan Inggris masa itu dan terus terasa relevan sampai era kontemporer ini.

Ketika para edukasionalis di zamannya menganggap anak seperti ember

kosong, yang baru berisi jika dituangi pengetahuan oleh guru, atau ranting pohon yang bisa dibengkok-bengkokkan ke arah mana pun guru mau, atau lilin plastis yang bisa dibentuk sesuka hati para pendidiknya, Charlotte meyakini anak-anak adalah jiwa dengan kedalaman dan kekayaan spiritual tak terbatas, ibarat obor yang sudah penuh minyak, hanya menunggu pantikan api kecil untuk bisa menyala berkobar-kobar.

Ketika para filsuf di negerinya berasumsi bahwa jiwa manusia itu tabula rasa, anak-anak ibarat lembaran putih polos yang menunggu untuk ditulisi, Charlotte berkata bahwa sejak semula anak adalah pribadi yang utuh, terlahir lengkap dengan berbagai hasrat, emosi, hati nurani, dan bakat. Pribadi itu akan terus menyingkapkan diri, sampai terungkap sepenuhnya, seturut pertambahan usianya. Orangtua dan guru hanya membantu agar pribadi itu mekar dalam segala kekuatan latennya, mengatasi kelemahan-kelemahan bawaannya.

Ketika masyarakat di eranya menganggap bahwa anak-anak keluarga miskin ditakdirkan menjadi orang berintelek rendah, percuma dididik karena kelak tetap akan menjadi ‘keset sosial’ dan warga tak beradab; bahwa anak-anak perempuan cukup belajar di rumah saja sebab toh mereka hanya akan menjadi istri

dan pengurus rumah tangga, Charlotte menyuarakan pendidikan liberal bagi setiap anak tanpa membedakan ras, strata sosial, ataupun gender. Ia yakin setiap anak terlahir setara, oleh karena itu berhak, dan mampu, mengenyam kesempatan pendidikan yang setara. Namun untuk menjalani metode pendidikan yang “memuaskan anak-anak tercerdas dan menyingkap inteligensi anak-anak terlamban” (Vol. 6, hlm. 28, 245), seorang guru pertama-tama harus yakin bahwa potensi kecerdasan itu memang tersimpan dalam diri semua anak.

Ketika para orangtua kebanyakan memandang anak sebagai ‘harta milik’ pribadi mereka, dan berpikir bahwa tugas mendidik anak cukup dipasrahkan kepada pengasuh, guru privat, dan lembaga sekolah, Charlotte menegaskan bahwa orangtua tidak boleh dengan seenaknya berkata, “Ini kan anakku! Aku bebas mendidiknya dengan cara apa saja!”. Anak-anak adalah kekayaan yang dititipkan Tuhan dan umat manusia kepada orangtua. Ibu dan ayah bertanggung jawab lebih dari siapa pun di bumi ini untuk memastikan bahwa anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan pendidikan di sekolah bukanlah yang terutama. Sesungguhnya, kata Charlotte, pendidikan di rumah jauh lebih penting ketimbang pendidikan di sekolah, sebab pengaruh

yang anak terima di rumah membekaskan kesan mendalam yang akan menentukan karakter dan karirnya kelak. ”Menjadi orangtua itu luar biasa: tidak ada promosi, kehormatan, yang bisa dibandingkan dengannya. Orangtua seorang anak bisa jadi membesarkan sosok yang kelak terbukti sebagai berkat bagi dunia.” (Vol. 1, hlm. 1)

Ketika para religius meyakinkan orangtua untuk mengandalkan agama dalam membangun karakter dan moral anak-anak mereka, Charlotte dengan berterus terang berkata bahwa tidak cukup membesarkan anak hanya dengan berharap dan berdoa. Agama memang sangat penting dalam memberi inspirasi dan batasan moral, tetapi ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku secara universal dalam mengasuh anak. Hukum-hukum fisiologis dan psikologis, seperti bagaimana otak bekerja atau bagaimana proses kejiwaan anak berlangsung, bukan milik eksklusif salah satu agama saja. Tak ubahnya hukum gravitasi, orang yang taat beragama akan merasakan kerugian besar jika melanggar hukum-hukum itu dan, sebaliknya, orang yang sekuler bisa berhasil mendidik anak dengan baik jika menaatinya.

Charlotte Mason lahir di Inggris tahun 1842 dan menikmati pendidikan di rumah dari kedua orangtuanya, sebelum ia menjadi yatim piatu di usia enam belas

tahun. Tetapi sebelum tahun yang menyedihkan itu, Charlotte muda sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Seorang perempuan progresif yang banyak berpikir, ia bekerja sambil merenung, membaca untuk menulis, menguji teori-teori di dalam praktek. Yang Charlotte cita-citakan adalah “a working philosophy of education”, filsafat pendidikan yang bukan cuma bagus dalam teori, tapi betul-betul bisa dipraktikkan dan betul-betul efektif menyingkapkan segenap potensi fisik, intelektual, mental, dan spiritual semua anak. Motto hidup Charlotte adalah: *For the children's sake*, semua demi anak-anak.

Dalam lima belas tahun karirnya sebagai guru di sekolah dasar lalu dosen di kolese pendidikan guru, Charlotte telah menyusun konsep-konsep pendidikannya sendiri, yang kemudian ia terbitkan dalam enam volume: *Home Education, Parents and Children, School Education, Ourselves, Formation of Character*, dan *Towards A Philosophy of Education*. Sejak volume pertama terbit – *Home Education* menguraikan prinsip-prinsip dasar mengasuh dan mendidik anak sampai dengan usia sembilan tahun – pemikiran Charlotte sudah disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah Inggris. Mereka ingin ide-ide Charlotte dipraktikkan lebih meluas di seluruh

Inggris. Tak lama kemudian, para simpatisan itu bergerak membentuk Parents' Educational Union (kemudian berubah nama menjadi Parents National Educational Union/PNEU) yang bermisi melaksanakan filsafat dan metode pendidikan Charlotte Mason. Mencerminkan jiwa dari karya Charlotte, dalam anggaran dasar pendiriannya, disebutkan bahwa “Persatuan ini hadir demi [memberi manfaat kepada] para orangtua dan pendidik *dari semua kelas [sosial]*.”

Tahun 1891, Charlotte pindah ke Ambleside untuk mendirikan House of Education, lembaga pendidikan-pelatihan bagi *governess* (guru privat keluarga) dan siapa saja yang berminat bekerja di sektor pendidikan. Satu tahun kemudian, PNEU juga mendirikan sekolah mereka sendiri di Ambleside sebagai wadah para *trainee* House of Education untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari dari Charlotte Mason. Dengan gaya belajar yang ramah anak: jam belajar singkat, tanpa *drill* atau hafalan garing, mata pelajaran bervariasi, tidak ada PR, tidak ada sistem ranking, banyak kegiatan prakarya (*hands on*) serta apresiasi seni dan budaya, jadwal teratur setiap siang sampai sore untuk menjelajah alam dan bermain bebas, ini adalah metode pendidikan yang jauh berbeda dari kebanyakan sekolah masa itu.

Mengingat banyaknya keluarga Inggris yang terlalu miskin untuk membayar *governess* atau berdomisili di daerah yang belum memiliki sekolah, Charlotte memprakarsai sistem pendidikan rumah dengan model korespondensi. Keluarga-keluarga ini bisa mendaftarkan anak-anak mereka untuk menjadi siswa jarak jauh. PNEU mengirimkan kurikulum, petunjuk proses belajar, dan buku-buku bacaan untuk anak pelajari bersama orangtua di rumah masing-masing. Kemudian di akhir term belajar, PNEU akan mengirimkan berkas evaluasi yang meminta anak menarasikan apa yang mereka pelajari selama term tersebut. Tidak ada nilai, tidak ada peringkat, semua narasi akan dibaca dan diberi catatan komentar, lalu anak bisa melanjutkan ke bahan pelajaran term berikutnya. Materi belajar adalah buku-buku terbaik dari para penulis dan sastrawan paling hebat yang bisa Charlotte temukan, diberikan sesuai tingkat usia para pelajarnya, yang selalu disegarkan dan dimutakhirkan dari term ke term.

Hasil dari sistem pendidikan jarak jauh yang ia susun mengejutkan bahkan Charlotte sendiri! Para siswa koresponden, yang meliputi anak-anak buruh tambang di daerah pelosok, menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memusatkan perhatian, kecintaan pada proses belajar, ketazaman

berpikir, kegembiraan membaca buku-buku ‘kelas tinggi’, dan pengetahuan yang luas akan berbagai hal. Mereka sanggup menarasikan kembali suatu bacaan hanya dengan sekali dibacakan, bahkan berbulan-bulan setelah bahan itu dibacakan.

Ternyata benar, tulis Charlotte, jiwa semua anak – apa pun ras, strata sosial, dan gendernya – selalu sedang menunggu untuk digugah. Dan sekali tergugah, mereka akan selamanya terbangun untuk mencintai pengetahuan dan kehidupan. Anak-anak yang seumur hidup mencintai proses belajar, yang belajar bukan demi imbalan pujian, gengsi, atau keuntungan material lainnya, melainkan terutama karena kegembiraan dalam belajar itu sendiri, yang tumbuh menjadi pribadi berwawasan luas penuh ide-ide akbar dengan karakter luhur yang berangkat dari tertanamnya kebiasaan-kebiasaan baik, tidakkah itu yang seharusnya dicita-citakan oleh sistem pendidikan? Visi itu hanya bisa digapai jika sistem pendidikan ditegakkan di atas asumsi-asumsi dan konsep-konsep yang benar, lalu dibangun dengan metode yang tepat. “Konsekuensi dari kebenaran itu terlalu besar, kita tidak boleh lalai menimbanginya, ” berulang-ulang Charlotte mengingatkan tentang itu.

Dalam volume bukunya yang terakhir, Charlotte merangkum semua

pemikiran yang telah ia rumuskan, uji, dan perbaiki selama 30 tahun PNEU berdiri. Dengan puas ia melaporkan hasil metode pendidikannya yang berhasil membangkitkan kecintaan belajar dalam diri puluhan ribu siswanya. Ia telah membuktikan bahwa anak-anak memang terlahir setara dalam hasrat mereka akan pengetahuan, tiada beda antara anak laki-laki dan perempuan, antara anak-anak kaya atau miskin, antara anak-anak cerdas atau 'terbelakang'. Sekalipun ia juga sadar, teori-teorinya masih perlu diuji coba dalam skala yang lebih luas, ia merasa akhirnya ia berhasil merumuskan sebuah filsafat pendidikan yang membumi, satu model pendidikan yang bisa memuliakan pikiran semua anak tanpa mengabaikan latihan jasmani maupun keterampilan praktis.

Charlotte Mason meninggal dalam tidurnya pada usia 81 tahun, dalam kondisi ingatan yang masih jernih, kemampuan berpikir yang masih tajam, dan hati yang tak pernah berhenti menawarkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Ia sangat dicintai dan kepergiannya adalah kehilangan besar bagi banyak orang. Sebuah buku, *In Memoriam of Charlotte M. Mason*, dipersembahkan oleh para kolega dan muridnya untuk mengenang sosok pribadi yang mengesankan ini. "Anak-anak dari banyak generasi akan berterima kasih kepada Tuhan untuk

Charlotte Mason dan semua karyanya, ” tulis salah satu dari mereka.

C. TIGA PERTANYAAN DASAR PENDIDIKAN

Ada tiga pertanyaan penting yang, kata Charlotte Mason, harus bisa dijawab oleh orangtua saat mereka ingin bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anaknya. Yang pertama, *mengapa* anak perlu belajar? Yang kedua, *apa* yang perlu ia pelajari? Yang ketiga, *bagaimana* sepatutnya mereka mempelajari itu? Jika kita berupaya dengan sungguh-sungguh mencari jawaban yang meyakinkan untuk ketiga soal ini, lanjutnya, kita akan mampu mengarahkan pendidikan anak-anak kita (Vol. 1, hlm. 171). Saya mendapati bahwa ketiga pertanyaan yang diajukan Charlotte itu harus dijawab secara berurutan, tidak bisa dibolak-balik. Pertanyaan tentang *mengapa* harus diselesaikan lebih dulu sebelum *apa* dan *bagaimana*.

Pertanyaan *mengapa* berurusan dengan visi kita tentang pendidikan. Dalam bukunya yang pertama, *Home Education*, Charlotte menguraikan betapa membesarkan anak, sama seperti proyek lain, paling baik dikerjakan ketika kita punya ide atau visi tentang hasil akhir yang kita harapkan. Kita mudah tergoda untuk terlalu fokus pada satu aspek dalam tumbuh kembang anak sehingga aspek lain

kita lupakan, misalnya demi prestasi akademis kegembiraan masa kecil anak dikorbankan. Jauh lebih sulit untuk tetap menjaga visi tentang anak secara *utuh*, bersikap seimbang dan tidak terobsesi dengan salah satu aspek.

Ketika bicara tentang pendidikan, kebanyakan kita terlalu sering menyamakan pendidikan dengan *sistem* pendidikan. Kita membayangkan sebuah mesin besar bernama ‘pendidikan’ (atau ‘sekolah’) yang akan memproses anak-anak dengan jenjang-jenjang dan langkah-langkah yang pasti. Anak masuk dari satu ujung sebagai bahan mentah, diolah melalui kegiatan belajar-mengajar selama sekian tahun, maka taraaaaa ... mereka keluar dari ujung lain sudah terkemas sebagai produk siap pakai yang terstandardisasi. Semua pendekatannya *objektif*. Semua prosesnya *mekanis*.

Pendekatan *objektif* artinya mengandaikan anak-anak itu sepenuhnya sebagai *objek*, benda, yang pasif dan pasrah, yang tidak berdaya, seperti lembar putih yang bebas ditulisi apa saja, seperti lilin plastis yang bisa dibentuk menjadi apa saja, seperti cabang tanaman yang boleh dibengkok-bengkokkan ke mana saja. Sementara, proses *mekanis* artinya setiap anak akan ditangani dengan cara yang seragam, mulai dari takaran materi sampai alat evaluasi. Harapan terbesar dari

sebuah sistem pendidikan (atau sekolah) yang mekanis adalah adanya resep tips dan trik paten yang bisa diulang oleh semua guru dalam semua kasus dengan hasil yang sama.

Sistem selalu dirancang untuk mempermudah pihak yang mengelola sistem. Para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat menyukai konsep pendidikan sebagai sistem. Rasanya begitu aman dan pasti ketika semuanya serba terukur dan terhitung, serba ada standar evaluasinya. Mereka bisa berkeliling melakukan ‘*quality control*’ dan menuliskan catatan bagi setiap siswa: dia lulus, dia tidak lulus. Sistem akan menyederhanakan proses rumit yang bernama ‘penyerapan pengetahuan’ menjadi nilai A, B, C, D, E dalam skala 0-100. Jelas sekali bagaimana sistem pendidikan dapat mempermudah kerja pemerintah dan sekolah, tetapi apakah sistem ini berpihak kepada anak? Bisakah ia memuliakan karakter seorang anak?

Sistem itu baik, kata Charlotte, sejauh ditempatkan pada perannya yang seharusnya, yakni sebagai “instrumen pendidikan” (Vol. 1, hlm. 10), bukan esensi pendidikan. Mari ingat kembali tiga pertanyaan mendasar pendidikan: *mengapa* anak harus belajar (tujuan pendidikan), *apa* yang harus ia pelajari (kurikulum), dan *bagaimana* cara terbaik

mempelajarinya (wujud teknis pelaksanaan). Sistem pendidikan adalah upaya untuk membakukan uraian tentang *apa* dan *bagaimana* suatu pendidikan dilaksanakan di lapangan. Namun, karena pertanyaan *apa* dan *bagaimana* itu hanyalah kelanjutan dari persoalan *mengapa* – yakni, hakikat dan tujuan pendidikan – sebuah sistem pendidikan hanya bisa efektif dan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang paham tentang esensi pendidikan itu. Waspadalah, selalu ada bahaya bahwa esensi akan dikudeta oleh instrumen. Charlotte mencontohkan, *Kindergarten Method* (metode pendidikan anak usia dini) yang dulu dirancang oleh para pendidik cerdas berdedikasi macam Froebel dan telah banyak berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia, akhirnya menjadi sistem yang kaku, kolot dan menyedihkan di tangan para praktisi yang tidak paham prinsip-prinsip yang mendasarinya. *Lesson learnt*: warisi apinya, bukan abunya.

Charlotte menyarankan agar orangtua lebih memandang pendidikan sebagai “metode”, bukannya “sistem”. Metode berisi: pertama, visi tentang tujuan akhir yang kita harapkan dari proses bernama pendidikan; dan kedua, prinsip-prinsip yang akan memandu kita sepanjang jalan menuju tujuan akhir itu. Berbeda dari langkah mekanis sistem yang kaku,

prinsip-prinsip metodelah ini luwes dan musti disesuaikan pada kasus (*customized*). Seperti air mengalir kadang deras, kadang lambat, kadang menderu, kadang menetes, kadang lurus, kadang berkelok, namun selalu menuju ke laut, demikian pula “orangtua yang melihat *arah tujuannya* – inti penuh kuasa dari metodenya – akan bisa memanfaatkan setiap situasi dari kehidupan sehari-hari anak sebagai kesempatan mendidik, ia tidak harus merencangkannya secara sengaja, begitu mudah dan spontan. Entah anak sedang makan atau minum, entah ia sedang di rumah atau di perjalanan, saat dia bermain – selalu ia dalam proses pendidikan sepanjang waktu.” (Vol. 1, hlm. 9)

Memahami pendidikan sebagai sebuah metode, alih-alih sebuah sistem, sangat cocok dengan kesadaran awal tentang hakikat anak sebagai pribadi yang utuh. Anak bukan benda tak berjiwa yang bebas kita isolasi dan manipulasi seperti bahan-bahan penelitian dalam laboratorium. Anak lebih dari sekedar bahan-bahan mentah untuk diolah dalam pabrik bernama sekolah. Anak-anak bukanlah sosok-sosok yang seragam minatnya, seragam gaya belajarnya, seragam kapasitasnya, seragam panggilan hidupnya. Mereka itu manusia, makhluk yang kata kitab suci menyimpan citra

Tuhan dalam dirinya. Mereka itu jiwa yang terus berubah, berproses, bertumbuh, berkembang, bertransformasi, *bukan objek!* Sistem pendidikan yang materialistik, utilitarian, berorientasi pasar, atau apa saja yang mereduksi keutuhan pribadi seorang manusia tidak akan memadai bagi anak-anak kita.

Di tengah situasi “berkabut dan muram, belum ada prinsip yang menyatukan, tujuan jelas belum dirumuskan, belum ada satu filosofi pendidikan, gonta-ganti cara, kegagalan, dan kekecewaan silih berganti yang menandai rekam jejak pendidikan kita”, Charlotte berpesan agar orangtua lebih bersungguh-sungguh merumuskan filosofi pendidikan keluarga masing-masing. “Sama seperti arus sungai tak akan lebih tinggi dari hulunya, upaya mendidik tidak akan bisa melampaui konsep pendidikan yang menjadi asal-usulnya.” (Vol. 1, hlm. i) Kita perlu lebih dulu menunjuk tegas ke arah satu tujuan akhir, baru kita bisa merancang upaya untuk sampai ke sana. “Gagal menemukan filosofi yang menunjukkan tujuan dan cara mencapainya akan menghasilkan depresi, bahkan tindakan-tindakan gila. Kita mengutip adagium ini, motto itu, sepotong ide dari tempat lain lagi, menjadikannya satu koleksi carikan tambal sulam yang menyedihkan untuk menutupi

ketelanjangan kita.” (Vol. 6, hlm. 334) “Dilihat dari segi mana pun, tidaklah berlebihan jika saya berkata bahwa orangtua yang tidak teguh mengikuti satu metode pendidikan, yang telah ia pikirkan dengan seksama, adalah orangtua yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan tanggung jawab yang ia terima dari anak-anaknya.” (Vol. 1, hlm. 8)

D. VISI PEMULIAAN KARAKTER: MAGNANIMITY

Tugas yang diemban seorang pendidik, menurut Charlotte Mason, tidak terbatas pada pengembangan kemampuan intelektual dan akademis anak. Kedua aspek itu hanyalah sebagian saja dari visi pendidikan yang lebih besar, yakni mendidik anak supaya ia “menjalani kehidupan yang patut di bumi, dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih mulia lagi di akhirat” (Vol. 1, hlm. 317).

Magnanimity. Kata inilah yang Charlotte pilih sebagai batu ujian keberhasilan pendidikan sekaligus gambaran ideal tentang pribadi anak macam apa yang kita harapkan terbentuk lewat proses pendidikan itu. Pribadi *magnanimous* adalah sosok yang “berpikiran besar, punya minat luas, tidak bisa membiarkan dirinya *terlalu* disibukkan oleh masalah-masalah pribadi

yang remeh” (Vol. 4, hlm. 78); “memiliki imajinasi yang berbudaya, kemampuan menilai dan menimbang yang terlatih, selalu siap menguasai kerumitan profesi apa pun, sementara pada saat yang sama tahu menempatkan dirinya sendiri dan bagaimana memanfaatkan segala kelebihanannya untuk meningkatkan kebahagiaannya, kebahagiaan sesamanya, dan kesejahteraan masyarakatnya – satu sosok yang bukan cuma bisa mencari nafkah hidup, tapi tahu bagaimana caranya hidup” (Vol. 6, hlm. 122). *Magnanimity* adalah gabungan antara kesanggupan untuk berpikir tinggi (*high thinking*) sekaligus kesiapan untuk hidup bersahaja (*lowly living*); di satu sisi memikirkan gagasan-gagasan terbesar yang mungkin dicapai pikiran manusia, di sisi yang lain menjalani pola hidup sederhana dan apa adanya (Vol. 2, hlm. 170). Seorang berkepribadian *magnanimous* pastilah tidak hidup di menara gading. Pergulatannya dengan ide-ide filosofis paling abstrak atau riset-riset ilmiah paling rumit atau pengalaman-pengalaman artistik dan spiritual paling halus sekalipun tidak akan pernah menghalanginya untuk terjun mengerjakan tugas-tugas harian yang paling kasar atau kerja-kerja sosial yang paling kumuh. *Magnanimity*, dalam bayangan Charlotte, adalah segala kepahlawanan, kesetiakawanan, kesediaan berkorban, dan semua kebesaran hati

manusia yang baru muncul ketika dihadapkan pada pertarungan hidup dan mati.

“Ideal yang terlalu tinggi!” komentar sebagian orang. Benarkah? Apakah ideal ini yang terlalu tinggi atau kita yang selama ini terlalu rendah menaksir potensi anak, potensi manusia? Ibarat jangkrik yang lama dikurung dalam kardus sepatu, dan ketika dilepaskan hanya bisa meloncat-loncat setinggi langit-langit kardus itu, demikian pula kita tak lagi tahu setinggi apa ideal pendidikan bisa kita gantungkan karena terlalu lama diindoktrinasi oleh tujuan-tujuan materialistik dan utilitarian. Pertanyaan-pertanyaan normatif mendasar seperti “Apa hakikat manusia? Apa yang layak menjadi tujuan hidupnya?” telah digantikan oleh pertimbangan pragmatis seperti, “Bagaimana supaya kita bisa cepat kaya, populer, naik kelas sosial, berkuasa, atau setidaknya bertahan hidup di dunia modern ini?”. Sekolah-sekolah kini sibuk menawarkan apa yang siswa atau orangtua atau negara hasrati, tanpa angkat bicara lagi tentang apa yang ketiga pihak itu *harusnya* hasrati. Dampaknya, anak-anak kita kehilangan “visi utuh tentang manusia, bagaimana hidup *senyatanya* dan *seharusnya* dalam semua ranah – individual, sosial, religius; bagaimana menunaikan kewajiban-kewajibannya

terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya manusia, dan terhadap Tuhan serta ciptaan-Nya.” (Hicks, 1999:13)

Kehilangan visi yang tinggi tentang pemuliaan karakter menyebabkan para pendidik bekerja seperti “petani yang berupaya membajak sawah dengan mata terpaku kepada alat bajaknya, alih-alih ke titik imajiner di horizon sana yang seharusnya jadi patokannya untuk menghasilkan alur bajakan yang lurus” (Hicks, 1999:12). Rendahnya minat baca, kreativitas, etos kerja, sampai budi pekerti dari lulusan sekolah-sekolah kita menunjukkan bahwa merendahkan cita-cita pendidikan seringkali membuat kita tak berhasil memperoleh bahkan target yang paling minim sekalipun. Anak-anak kita sedang – dalam bahasa Charlotte – mengalami ‘malnutrisi spiritual’ karena sekolah-sekolah mengabaikan aspek hakiki dari diri mereka, hanya berkonsentrasi mencetak mereka menjadi pekerja dan pencari nafkah tanpa mendidik karakter mereka menjadi luhur.

Orangtua dan sekolah perlu terus diingatkan agar jangan sampai terlalu sibuk dengan kepentingan atau kebanggaan sesaat sehingga lupa memandang titik imajiner itu – *magnanimity* – sementara mereka menggerakkan alat bajak jengkal demi jengkal di ladang pendidikan anak-anak.

Charlotte mengajak kita untuk menyadari bahwa, “sebuah pendidikan yang disetir oleh kuasa kepentingan-kepentingan ekonomis akan memiliki motif yang terlalu sempit dan utilitarian, lantas kehilangan elemen ideal yang menjadi basis kekuatan pendidikan untuk membentuk karakter” (Vol. 6, hlm. 280).

Suatu hari kelak, kita akan melepas anak-anak ke dunia nyata dengan segala permasalahannya. Kita berharap mereka mampu membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang baik, benar, dan bijak bagi hidup mereka maupun orang lain. Dua puluh butir rumusan filosofi pendidikan Charlotte Mason ditutup dua prinsip pemandu penting yang akan membuat anak siap hidup mandiri di dunia nyata sebagai pribadi berkarakter, cerdas sekaligus bermoral. Charlotte menamai dua prinsip itu *the way of the will* dan *the way of reason*.

The way of the will adalah kemampuan membedakan antara ‘apa yang aku ingini’ (*I want*) dengan ‘apa yang aku kehendaki’ (*I will*). Meski kadang sulit dibedakan, anak harus tahu bahwa keduanya tidak identik. Ketika lapar rasanya dia ingin makan, namun dia bisa *menghendaki* untuk tetap berpuasa sekalipun perut keroncongan. Ketika berhadapan dengan masalah mungkin dia ingin lari, namun dia bisa *memilih* untuk

tetap menghadapinya sekalipun hati ketakutan. Ketika prinsip-prinsip yang ia tahu benar berseberangan dengan arus mayoritas berkuasa tentu dia tergoda untuk berkompromi, namun dia bisa *memutuskan* untuk tetap berlaku jujur sekalipun nyawa taruhannya.

Di tahun-tahun pertamanya, kehendak anak masih sangat lemah dan justru tampak paling lemah pada anak-anak yang dibilang *strong-willed* atau keras kepala. Anak semacam itu hanya bisa mengiyakan saja dorongan impulsifnya. Begitu matanya melihat permen, ia langsung minta diberi permen saat itu juga. Ia menangis, merengek, protes, tantrum kalau keinginannya ditolak, walaupun mungkin ia sudah tahu keinginan itu salah. Kehendaknya belum berdaya untuk mengatakan ‘tidak!’ atau ‘tunggu dulu!’ atau ‘sudah cukup!’ terhadap apa yang dia inginkan. Namun, berangsur-angsur, jika memperoleh *habit training* yang tepat secara bertahap, anak akan makin berkuasa mengendalikan keinginan-keinginan itu. Pada tahap terampil, anak bahkan bisa berkata, “Aku akan (*will*) melakukannya!” sekalipun hal tersebut sulit atau sebetulnya ia sedang tidak *mood* – lalu menunaikan pekerjaan itu semata-mata karena ia telah memutuskan untuk melakukannya, oleh

kesadarannya sendiri, tanpa ada iming-iming atau ancaman dari luar.

Ukuran kekuatan berkehendak adalah “bisa menyuruh dirinya sendiri memikirkan apa yang ia pilih untuk pikirkan.” (Vol. 1, hlm. 323) Maka, sebagai poin penting dari *the way of the will*, Charlotte berharap setiap anak dilatih menguasai teknik distraksi pikiran, yaitu mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran penghambat ke arah pikiran-pikiran pendorong yang memampukan dia menyelesaikan tugasnya. “Tatkala pikiran-pikirannya mengembara ke kenikmatan-kenikmatan yang terlarang atau berbagai hambatan yang harus ia hadapi dalam tugasnya, ia lalu menegakkan diri, dan dengan penuh ketetapan memantapkan perhatiannya kepada manfaat-manfaat yang paling memotivasinya untuk meneruskan pekerjaan, pada rasa lega dan senang yang akan ia peroleh setelah kerja kerasnya nanti, pada tanggung jawabnya untuk menunaikan tugas itu. Gerbong-gerbong pikirannya melaju di jalur yang ia *kehendaki* untuk mereka lalui, dan pekerjaan itu tidak lagi terasa berat.” (Vol. 1, hlm. 324) Tahu betul apa yang mau dikerjakan lalu memfokuskan pikiran pada tujuan sampai pekerjaan itu selesai, “inilah garis yang memisahkan antara pribadi efektif dan tidak efektif, antara orang besar dengan kebanyakan, antara mereka yang

berprestasi dengan yang sekedar ingin berprestasi.” (hlm. 323)

The way of reason adalah keterampilan menggunakan daya nalar sembari menyadari batas-batas daya nalar itu. Prinsip ini berarti “anak-anak harus belajar untuk tidak terlalu bersandar pada penalaran mereka. Penalaran itu bagus dalam mendemonstrasikan kebenaran matematis dan logis, tetapi tidak dapat diandalkan untuk menghakimi nilai-nilai sebab penalaran kita cenderung membenarkan segala jenis ide yang keliru (*erroneous*) tatkala kita betul-betul ingin meyakini ide-ide itu.” (Vol. 6, hlm. xxxi)

Era modern ini adalah era ketika “nalar jadi semacam dewa baru bagi banyak orang, dewa yang punya kekuasaan besar dan keutamaan sejati. Ungkapan nalar yang paling langsung, yakni sains, tampak tidak ada duanya. Gabungan sains dan nalar dianggap akan melenyapkan kemiskinan, penyakit, dan kebodohan di dunia. Keduanya akan mengikis habis syak-wasangka dan takhayul, juga akan menghasilkan penjelasan yang rapi mengenai semua yang ada di bawah matahari.” (Calne, 2005:13) Kita melihat pendewaan atas nalar ini dalam perilaku para orangtua mengidam-idamkan anak ber-IQ tinggi, atau sikap sekolah dan masyarakat yang memuja habis anak-anak jurusan IPA

(ilmu eksak) sebagai kaum cerdas sambil menstigma anak-anak jurusan IPS atau bahasa sebagai warga civitas akademika kelas dua yang ‘bodoh’.

Benarkah kapasitas nalar yang makin hebat menjamin bahwa perilaku kita akan lebih baik? Apakah kepakaran kita dalam sains atau teknologi menjadikan karakter kita lebih luhur? Sejarah telah menggugurkan mitos optimisme berlebihan terhadap nalar itu. Di dunia ini, tidak banyak negara yang lebih hebat dari Jerman dalam hal perkembangan nalar, sebagaimana tercermin dalam filsafat, musik, puisi, sains, dan teknologi mereka. Inilah negeri yang melahirkan sosok-sosok sekaliber Bach, Beethoven, Brahms, Goethe, Leibniz, dan Kant. Namun kita menyaksikan suatu paradoks bahwa ternyata negeri yang penuh orang-orang cerdas seperti itu bisa menjadi sumber dan tempat terjadinya kebiadaban kemanusiaan yang paling irasional dan tragis sepanjang sejarah! “Gerakan Nazi bukan dirancang oleh orang-orang bebal, akarnya bertumpu pada bahu kaum cendekiawan. Pengelolaan *the final solution* atas orang Yahudi sepenuhnya tergantung pada kemampuan menerapkan suatu produk nalar – teknologi modern – pada soal-soal transportasi massal, dalam meramu dan mengalengkan Zyklon B, dan pada pembangunan tungku maut yang dapat

terus menyala dengan mayat-mayat tahanan itu sendiri sebagai bahan bakar.” (Calne, 2005:5).

Simpulan dari Donald B. Calne sebagai guru besar neurologi tentang kaitan antara rasionalitas dan perilaku manusia menurut saya selaras dengan temuan Charlotte Mason. Sekalipun sangat hebat dan rumit, nalar hanyalah piranti netral untuk membantu manusia mencapai apa yang ia kehendaki. Nalar bisa menjawab tentang *bagaimana* sebaiknya kita melakukan sesuatu, tetapi dia bukanlah pemberi alasan *mengapa* kita patut melakukannya. Nalar membantu kita mencari *cara* yang paling pas, cepat, mudah, efektif dan efisien untuk sampai di tujuan, tetapi kerjanya tergantung pesanan Kehendak. Entah seseorang mau melakukan kejahatan atau kebaikan, nalarnya akan membantu. Seseorang bisa menciptakan rasionalisasi meyakinkan untuk segala macam ide keji yang ia miliki. Tak berlebihan rasanya jika saya katakan: orangtua atau sekolah yang hanya melatih daya nalar anak secara optimal, namun tanpa menyediakan arahan moral dan spiritual tentang kepada siapa atau hal berharga apakah patut ia abdikan daya nalarnya itu, bisa jadi sedang membesarkan seseorang yang akan menjadi kutuk bagi masyarakat, bahkan dunia.

“Jangan biarkan ada pemisahan apa pun antara kehidupan intelektual dan spiritual anak-anak kita, namun ajarilah mereka bahwa Ruh Ilahi senantiasa terhubung dengan ruh mereka dan menolong mereka dalam segala minat, tanggung jawab, dan kesukaan hidup”. Lewat butir terakhir filosofi pendidikannya ini, Charlotte berharap agar kehendak yang kuat dan nalar yang terlatih selalu didampingi oleh nurani yang terasah (*instructed conscience*), sebagai pemberi hukum yang menetapkan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, boleh atau tidak boleh dikerjakan, sebagai hakim yang senantiasa mengadili moralitas manusia (Vol. 1, hlm. 330).

Ketiga piranti ini musti menjadi satu kesatuan, tak bisa bekerja sendiri-sendiri. Berkehendak kuat saja menjadikan anak seorang bebal yang nekad. Berdaya nalar saja membuat anak seorang cerdas yang oportunistis. Punya nurani peka saja menyebabkan anak jadi seorang baik hati yang ditipu sana-sini. Berkehendak kuat dan berdaya nalar adalah kombinasi terburuk – para pembunuh bayaran, koruptor kelas kakap, dan demagog adalah contoh-contohnya. Berkehendak kuat dan berhati nurani adalah kombinasi yang lumayan tetapi bakal memboroskan banyak energi dan sumber dayanya karena tidak cukup cerdas mencari solusi yang

tepat. Pribadi yang berdaya nalar dan bernurani adalah kombinasi lain yang cukup baik, namun tanpa kekuatan kehendak, ia sering akan frustrasi karena tak cukup gigih menyelesaikan tugas-tugasnya.

Pemetaan di atas adalah generalisir ramalan yang sangat disederhanakan. Kepribadian manusia begitu rumit dan peristiwa kehidupan sangat kompleks, kita tak bisa menuliskan biografi seorang anak sebelum ia menjalaninya. Namun apa pun yang menunggunya di masa depan, anak akan memperoleh manfaat besar jika dapat mengenali dirinya sendiri. Adalah tugas para pendidik untuk membantu setiap siswanya tahu persis jati diri dan tujuan hidup mereka sebagai pribadi yang unik. *I am, I can, I ought, I will*, itulah formula yang Charlotte harapkan jadi semboyan hidup setiap anak. “*I am* – aku punya kekuatan untuk mengenal diri sendiri. *I ought* – di dalam hatiku ada satu hakim moral, yang kepadanya aku tunduk, untuk memberi petunjuk dan menuntutku dalam menjalankan tanggung jawab. *I can* – aku sadar bahwa aku punya kuasa untuk melakukan apa yang aku tahu sebaiknya aku lakukan. *I will* – aku berkehendak untuk memakai kuasa dan kemampuan itu dengan kesadaran dari diri sendiri demi mewujudkan apa yang aku kehendaki.” (Vol. 1, hlm. 330)

Akhir kata, karakter manusia adalah karya seni yang tak pernah habis diukir sepanjang hayat. Pendidikan adalah suatu perjalanan panjang transformasi diri untuk makin sesuai dengan Figur Ideal – *magnanimity, insan kamil, imitatio Christi, archetype*, apa pun istilahnya. Dalam mengajarkan hidup yang bajik (*life of virtue*) itu kepada anak-anak kita, terasa sungguh bahwa peran kita sebagai pendamping mereka hanya sementara. Sementara tahun-tahun berlalu dengan cepat, bayi-bayi kita dulu beranjak makin dewasa, mari kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar mereka siap menerima tanggung jawab terbesar dalam kehidupan mereka: menjadi seniman atas diri dan hidup mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreola, Karen. *A Charlotte Mason Companion: Personal Reflections on the Gentle Art of Learning*. Quarryville, PA: The Charlotte Mason Research & Supply Co.
- Cooper, Elaine (ed.). 2004. *When Children Love to Learn: A Practical Application of Charlotte Mason's Philosophy for Today*. Wheaton, IL: Crossway Books.
- Gardner, Penny. 2007. *Charlotte Mason Study Guide: A Simplified Approach to a 'Living Education'*. (<http://www.pennygardner.com>)
- Hicks, David V. 1999. *Norms and Nobility: A Treatise on Education*. Lanham: University Press of America.

- Mason, Charlotte. *The Original Home School Series*. (<http://www.amblesideonline.org>)
- Volume 1 – *Home Education: Training/Educating Children Under 9*
 - Volume 2 – *Parents and Children: The Role of the Parent in the Education of the Child*
 - Volume 3 – *School Education: Developing a Curriculum*
 - Volume 4 – *Ourselves: Improving Character and Conscience*
 - Volume 5 – *Formation of Character: Shaping the Child's Personality*
 - Volume 6 – *A Philosophy of Education*
- Laurio, Leslie Noelani. *Charlotte Mason Home School Series Summary (Volume 1-6)*. (<http://www.amblesideonline.org>)
- Shaeffer, Sonya. 2007. *Laying Down the Rails: A Charlotte Mason Habit Handbooks*. (<http://www.simplycharlottemason.com>)
- _____. 2007. *Education Is: An Atmosphere, A Discipline, A Life*. (<http://www.simplycharlottemason.com>)
- _____. 2009. *Masterly Inactivity with Charlotte Mason*. (<http://www.simplycharlottemason.com>)
- Smith, Carol J. 2000. *Charlotte Mason: An Introductory Analysis of Her Educational Theories and Practices*. Disertasi untuk memperoleh gelar doktor pendidikan dalam kurikulum dan pengajaran di Virginia Polytechnic Institute and State University. (<http://www.childlightusa.org>)
- Sularto, St. “Menggugat Praksis Pendidikan”. KOMPAS, 2 Mei 2012.

PENGUATAN EKISTENSI BANGSA MELALUI SENI BELA DIRI TRADISIONAL PENCAK SILAT

Oleh

Endang Kumaidah

Pengajar Jurusan Fisiologi

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

ABSTRACT

National sport has a considerable influence in strengthening the existence of a nation. Pencak Silat is both a sport and a martial art originally Indonesian. More than just a means to protect self-defense, it can also be a vessel of nationalism, an identity of Indonesia in its art and aesthetic beauty. Its movements resemble those of Indonesian animals and uniquely contain traditional dance characteristic. In some ethnic cultures, this martial art becomes an integral part in rituals and religious ceremonies. It is then concluded that Pencak Silat may directly or indirectly build and develop the personality and noble character of Indonesian people through sportsmanship training.

Keywords: *Pencak Silat, nationalism, traditional martial art.*

A. PENDAHULUAN

Pencak silat atau silat adalah suatu seni beladiri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Seni beladiri pencak silat secara luas telah dikenal di Indonesia, bahkan mulai berkembang ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan, tepatnya di provinsi Pattani, sesuai dengan penyebaran dan perkembangan suku bangsa Melayu Nusantara.

Pencak silat berasal dari dua kata yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerak dasar beladiri yang terikat pada peraturan. Silat berarti gerak beladiri sempurna yang bersumber pada kerohanian. Istilah *silat* dikenal secara luas di Asia Tenggara, akan tetapi di Indonesia istilah yang digunakan adalah *pencak silat*. Istilah ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni beladiri tradisional yang berkembang di Indonesia. Nama *pencak* digunakan di Jawa, sedangkan *silat* digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Dalam perkembangannya kini

istilah *pencak* lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan *silat* adalah inti ajaran beladiri dalam pertarungan. Maryono (1999) menyimpulkan bahwa yang menjadi kriteria untuk membedakan arti Pencak dan arti Silat adalah apakah sebuah gerakan itu boleh dipertontonkan atau tidak.

Pengurus Besar IPSI pada tahun 1975 mendefinisikan pencak silat sebagai berikut: “Pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi (kemandiriannya) dan integritasnya (manunggal) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Tokoh-tokoh pendiri IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) telah sepakat untuk tidak membedakan pengertian Pencak dengan Silat karena kedua kata tersebut memang mempunyai pengertian yang sama. Kata Pencak maupun Silat sama-sama mengandung pengertian kerohanian, irama, keindahan, kiat maupun praktek, kinerja, atau aplikasinya.

Notosoejitno (2001:1) menyatakan bahwa dilihat dari sosok, profil atau tampilan pencak silat di Indonesia ada tiga, yaitu:

1. Pencak silat asli (*original*), ialah pencak silat yang berasal dari lokal dan masyarakat etnis di Indonesia.
2. Pencak silat bukan asli yang sebagian besar berasal dari Kung Fu, Karate dan Jujitsu.
3. Pencak silat campuran, ialah campuran antara pencak silat asli dan bukan asli (beladiri asing yang ingin bergabung dengan nama pencak silat sesuai peraturan AD dan ART IPSI).

Kini pencak silat telah merambah masuk dalam dunia pendidikan. Di berbagai sekolah dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, Pencak Silat menjadi bagian dari kegiatan ekstra kurikuler yang banyak di gemari. Bahkan Pencak Silat telah menjadi salah satu cabang olahraga yang ditandingkan dalam berbagai kejuaraan baik tingkat nasional sampai tingkat dunia. Jika keempat aspek tersebut dapat dipadukan dalam diri pesilat, sudah barang tentu akan menjadi salah satu unsur perekat bangsa untuk bersatu dan mengangkat harkat, derajat, dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

B. NILAI LUHUR PENCAK SILAT

Pencak silat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan karena pencak silat merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Ilmu beladiri

ini berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan senjata tradisional seperti parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti dalam tradisi suku Nias. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar pada zaman dahulu, seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu beladiri silat yang luar biasa tangguhnyanya dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang memiliki kemahiran dalam pembelaan diri dan Negara yang dapat diandalkan.

Peneliti silat Donald F. Draeger (2006) berpendapat bahwa bukti adanya seni beladiri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Sementara itu Sheikh Shamsuddin (2005) berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu beladiri dari Cina dan India dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya. Sebagai wahana pendidikan kependekaran, pencak silat sarat akan nilai-nilai luhur.

Nilai-nilai luhur dalam pencak silat dapat dimengerti dari empat aspek, yaitu aspek mental spiritual, aspek olahraga, aspek seni gerak, dan aspek beladiri.

1. Aspek *Mental Spiritual*: Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Para pendekar dan maha guru pencak silat zaman dahulu seringkali harus melewati tahapan semadi, tapa, atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya.
2. Aspek *Seni Budaya*: Budaya dan permainan "seni" pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah *Pencak* pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat, dengan musik dan busana tradisional.
3. Aspek *Beladiri*: Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu beladiri dalam pencak silat. Istilah *silat*, cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis beladiri pencak silat.
4. Aspek *Olah Raga*: Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh.

Keempat aspek tersebut membentuk satu kekuatan dan kesatuan yang bulat (Subroto dan Rohadi, 1996:6).

Menurut Draeger, senjata dan seni dalam beladiri silat adalah tidak dapat terpisahkan, bukan hanya dalam hal olah tubuh saja, melainkan juga dalam hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual seseorang. Sebagai aspek mental-spiritual, pencak silat lebih banyak menitik beratkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur. Pada aspek beladiri, pencak silat bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membeladiri terhadap berbagai ancaman dan bahaya. Gerakan dasar dalam silat itu sendiri banyak diperoleh dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti menirukan gerakan kera, harimau, ular atau burung elang. Beberapa gerakan dasar dalam pencak silat antara lain sikap kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan, langkah, kembangan, jurus, sapuan, guntingan, dan terakhir kuncian yang mengandung unsur-unsur tarian sehingga memperindah gerakan pencak silat.

Dari ilmu beladiri dan seni tari rakyat, pencak silat berkembang menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Sebagai alat pemersatu bangsa pencak silat berperan dalam bela negara untuk menghadapi penjajahan bangsa asing. Dalam sejarah

perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata, seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar wanita, seperti Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia.

Pencak silat juga dipelajari oleh banyak kaum pergerakan politik termasuk beberapa organisasi kepanduan nasional. Dengan diam-diam perguruan pencak silat berhasil memupuk kekuatan yang siap untuk melawan penjajah sewaktu-waktu. Bagi kaum pergerakan yang ditangkap oleh penjajah dan dibuang secara diam-diam, mereka menyebarkan beladiri pencak silat di tempat pembuangan. Namun penjajah Belanda mempunyai politik yang ampuh dalam memecah belah antar suku bangsa atau aliran pencak silat (*divide et impera*). Lain halnya pada penjajahan Jepang. Pencak silat dibebaskan untuk berkembang. Jepang memanfaatkannya untuk menghadapi Sekutu. Bahkan Jepang menganjurkan pemusatan tenaga aliran pencak silat di seluruh Jawa secara serentak yang diatur oleh pemerintah di Jakarta. Namun Jepang tidak menyetujui pencak silat menjadi olahraga untuk senam pagi di sekolah-sekolah, agar tidak menyaingi senam Taisho Jepang yang sudah lebih dulu dipakai untuk senam setiap pagi hari.

Pencak silat berkembang setelah perguruan pencak silat yang dimotori oleh kalangan pelajar eks PETA, Pasukan Pelopor, dan Heiho, mulai menyusun sistem pengajaran pencak silat. Sistem pengajaran yang diberikan mengenakan seremonial seperti beladiri Jepang (upacara, menghormat, berdoa dan mulai pemanasan, berlatih dan ditutup dengan seremonial lagi). Sistem pengajaran berbeda-beda kalau dilihat antara sistem pengajaran pencak silat dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera.

Sesuai dengan tuntutan perjuangan untuk bersatu, pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta dibentuk sebuah wadah tunggal organisasi Pencak Silat yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, disingkat IPSI. Dengan tujuan:

1. Mempersatukan dan membina seluruh perguruan Pencak Silat yang terdapat di Indonesia.
2. Menggali, melestarikan, mengembangkan dan memasyarakatkan Pencak Silat serta nilai-nilainya.
3. Menjadikan Pencak Silat beserta nilai-nilainya sebagai sarana *nation* dan *character building* serta sarana perjuangan bangsa.

Dalam konteks ketahanan nasional, seni beladiri ini dapat dipergunakan sebagai filter budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Pencak silat sebagai seni beladiri lokal menjadi salah

satu alat pemersatu bangsa, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Silat telah memberikan banyak sumbangsih pada negara dan bangsa ini, baik dalam hal pencapaian prestasi olahraga maupun dalam penguasaan bela Negara. Dan para cerdik cendekiawan yang bijak mengatakan “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya luhurnya sendiri”.

Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya kesenian *Tari Randai* yang tak lain adalah gerakan *silek hariamau Minangkabau* yang kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Dalam prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi *palang pintu*, yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil, yang sering dipergakan dalam prosesi pernikahan.

Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara (*pendekar*) kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan

pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria.

Dari dulu Pencak Silat beladiri mempunyai peran penting di masyarakat kita. Kepulauan Nusantara ini, yang didiami berbagai macam suku bangsa dengan karakteristik biologis, sosial, dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun mereka sama-sama mempunyai tradisi mempelajari Pencak Silat sebagai alat pembela diri dalam usaha bertahan, dan menghadapi alam, binatang, maupun manusia.

Pencak silat memiliki peranan cukup penting dalam meningkatkan sikap mental dan kualitas diri generasi muda. Hal ini tentu saja akan terkait dengan tujuan pengembangan generasi muda yang berkesinambungan, sehingga pencak silat menjadi suatu peluang bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk ikut membantu meningkatkan kualitas peserta didik melalui pelatihan sikap mental dan kedisiplinan sehingga akan mencetak generasi muda yang berjiwa kesatria.

Pencak Silat yang tumbuh dan berkembang di Negara kita ini adalah buah karya manusia, sekaligus pedoman orientasi kehidupan bagi dirinya. Sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat, Pencak Silat merupakan sebuah sistem budaya yang saling mempengaruhi dengan alam di lingkungannya dan tidak dapat terpisahkan

dari derap aktivitas manusia. Bila pada tingkat perseorangan Pencak Silat membina agar manusia bisa menjadi teladan yang mematuhi norma-norma masyarakat, sedangkan pada tingkatan kolektif atau sosial Pencak Silat bersifat kohesif yang dapat merangkul individu-individu dan mengikat mereka dalam suatu hubungan sosial yang menyeluruh.

Dalam hal ini, fakta tersebut menyatakan bahwa pencak silat di Indonesia memiliki beberapa nilai positif yaitu, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa ksatria, disiplin dan keuletan yang lebih tinggi.

C. RANGKUMAN

Pencak silat merupakan salah satu olahraga tradisional bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Pengertian pencak silat memiliki suatu pengertian yang sangat luas dan memiliki fungsi yang jelas, diantaranya adalah bahwa Pencak Silat sebagai alat untuk berolah raga, sebagai alat untuk beladiri, sebagai wahana spiritualitas, sebagai pertunjukan atau kesenian, dan sebagai sarana untuk membela bangsa.

Pencak silat sebagai salah satu seni budaya asli Indonesia mampu memberikan peranan penting bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan eksistensinya di mata dunia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Pencak Silat dewasa ini khususnya perkembangan di negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina dan Thailand Selatan, tepatnya di provinsi Pattani. Di samping perkembangan di beberapa Negara, saat ini Pencak Silat telah dipertandingkan dalam event-event resmi seperti SEA Games, Asian Games dan Kejuaraan Dunia. Dengan telah dipertandingkannya Pencak Silat dalam event-event resmi otomatis olahraga pencak Silat semakin diminati dan dikenal banyak orang, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Dahulu para pahlawan menggunakan pencak silat sebagai cara untuk melawan penjajah asing, setelah kemerdekaan pencak silat menjadi bagian dari budaya dan kini pencak silat telah menjadi olahraga, menjadi salah satu *lifestyle*, salah satu pilihan untuk merefleksikan diri dan juga melatih kebugaran fisik untuk pertahanan diri. Tanpa kita sadari, pencak silat ini telah menjadi identitas nasional, dimana olahraga ini, kebudayaan ini, telah muncul di mana-mana dalam masyarakat kita. Pencak silat di negara kita, tak ubahnya

taekwondo atau karate di jepang dan korea, yang pada akhirnya seni beladiri inilah yang menjadikan salah satu bukti ke-eksistensian mereka di negara lain, taekwondo dan karate telah membawa nama korea dan jepang ke seluruh dunia.

Kini, pencak silat pun kian diminati oleh masyarakat, baik masyarakat Indonesia, ataupun masyarakat internasional. Di Amerika dan beberapa negara di eropa, beberapa perguruan pencak silat telah menerima murid-murid di negara-negera itu. Pencak silat kini bisa disejajarkan dengan seni beladiri lain semacam taekwondo, karate, judo, kempo, muay thai, dan lain sebagainya. Di Universitas Diponegoro sendiri, juga ada beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berjenis pencak silat, dan memiliki persatuan yang berbeda pula, seperti Persatuan Setia Hati Terate, Merpati Putih, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bukti bahwa pencak silat merupakan salah satu kunci eksistensi bangsa, bahwa bangsa ini masih ada, budaya bangsa ini masih ada, salah satunya masih banyaknya animo masyarakat untuk melestarikan keberadaan seni beladiri pencak silat ini.

DAFTAR PUSTAKA

M., Saleh. 1991. *Pencak Silat (Sejarah Perkembangan, Empat Aspek,*

Pembentukan Sikap dan Gerak).
Bandung: IKIP.

Maryono, O'ong. 2000. *Pencak Silat: Merentang Waktu*. Yogyakarta: Galang.

Subroto, Joko, dan Moh. Rohadi. 1996. *Kaidah-Kaidah Pencak Silat Seni yang Tergabung dalam IPSI*. Solo: CV Aneka.

Internet:

www.156tribuana.wordpress.com/sekelum-it-peranan-pencak-silat/
www.trisukmajatipurworejo.blogspot.com/2012/06/apa-itu-pencak-silat.html
www.syahazis-nangin.blogspot.com/2012/07/pencak-silat-wadah-pemersatu-bangsa.html
[www.id.wikipedia.org/wiki/pencak silat](http://www.id.wikipedia.org/wiki/pencak_silat)
[www.id.wikipedia.org/wiki/Ikatan Pencak Silat Indonesia](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia)

BAHASA POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA LUDWIG WITTGENSTEIN

Oleh

Sri Rahayu Wilujeng

Pengajar Jurusan Sastra dan Bahasa Jepang
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

In Ancient Greek, human being is termed Homo ludens, a game-player animal. In Wittgenstein's perspective, politics may then be defined as a game which needs a language game as a means of communication. All political systems practiced throughout the world use language games, and the democratic system is the one most dependent to its language game. Through the game, political institutions gain vote and collect sympathy from the people. By practicing language game one persuades others in order to have same opinion or idea. Therefore, one should be careful and critical in weighing political statements, questioning what meanings lie behind them, within the democratic system.

Keywords: Wittgenstein, language game, democracy

A. PENDAHULUAN

Membicarakan masalah filsafat pada dasarnya sama dengan membicarakan masalah manusia. Filsafat pada awal kemunculannya berusaha menjawab problem-problem dasar manusia. Problem-problem ini sebelumnya sudah dijawab oleh tradisi mitos, namun jawaban yang diberikan tidak mampu memuaskan rasa ingin tahu manusia. Munculnya filsafat bisa dikatakan sebagai revolusi pemikiran. Sejak runtuhnya zaman mitos pada abad VI SM, maka dunia memasuki zaman baru yaitu zaman *Logos*. Pada zaman ini akal

mendapatkan tempat yang terhormat. Penggunaan akal dalam mencari kebenaran, sikap kritis dalam menerima kebenaran, dan jawaban-jawaban spekulatif yang diberikan menyebabkan filsafat berkembang cepat. Perkembangan filsafat ini merupakan benih munculnya ilmu pengetahuan.

Sejarah filsafat yang sekaligus juga ilmu pengetahuan ini memang tidak tuntas dalam memberikan jawaban masalah-masalah manusia. Jawaban yang diberikan bersifat spekulatif, terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Jawaban

yang diberikan untuk sementara mampu menjelaskan problem awal filsafat seperti, epistemologi (pengetahuan), kosmologi (alam), metodologi, etika, anthropologi (manusia), teologi (Tuhan). Semakin berkembangnya rasa ingin tahu manusia, tidak hanya menyebabkan munculnya cabang-cabang filsafat tetapi juga menyebabkan munculnya ilmu-ilmu khusus yang lebih spesifik. Sejalan dengan perkembangan zaman objek pembahasan filsafatpun berkembang sedemikian beragam.

Pada abad XX filsafat mengalami pembalikan. Sering dikatakan bahwa filsafat mengalami pembalikan ke arah bahasa (*linguistic turn*). Bahasa menjadi sasaran bahasan filsafat. Istilah kunci yang dianggap pokok adalah bahasa. (Sugiharto, 79). Filsafat bahasa merupakan cabang filsafat yang muncul paling akhir di abad XX. Bahasa merupakan masalah yang penting bagi manusia. Manusia menggunakannya sejak lama sebagai media komunikasi. Pada awalnya manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol yang merupakan bentuk bahasa yang sangat sederhana kemudian berkembang menjadi bahasa yang sangat kompleks. Bisa dikatakan bahwa bahasa sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.

Di samping bahasa masih ada masalah yang merupakan bagian integral

dalam kehidupan manusia yaitu masalah politik. Menurut pendapat Aristoteles manusia adalah *Animal Sociale* atau *Zoon Politicon*. Manusia adalah binatang yang tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup bersama dan membutuhkan orang lain. Ia bukan hanya sekedar hidup berkelompok atau hidup ada bersama-sama dengan yang lain. Ia membutuhkan hidup bersama orang lain dimana terdapat saling berhubungan dan saing ketergantungan. Secara kodrati hidup bersama dengan orang lain adalah suatu kebutuhan. Dalam hidup bersama ini secara alamiah muncul suatu sistem yang mengatur kepentingan bersama.

Dalam hidup bersama ini selalu ada pihak yang lebih kuat yang berkuasa atas pihak lain. Sejalan dengan dengan semakin kompleksnya masalah-masalah dalam hidup bersama ini, maka sistem yang mengaturnyapun berkembang. Sistem ini bisa muncul secara alamiah maupu lewat rekayasa (teori atau pemikiran). Secara sederhana politik dapat diartikan suatu bidang yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan bersama. Dalam masalah politik selalu berkaitan dengan komunikasi. Bahasa adalah media dalam komunikasi politik.

Landasan teori yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah teori atau pemikiran dari Ludwig Wittgenstein. Seorang filsuf penting yang

mengembangkan filsafat bahasa. Filsafatnya sering disebut filsafat analitik, dalam arti bahwa analisa bahasa merupakan metode dalam filsafat. Wittgenstein mempunyai dua tahap pemikiran yang berbeda. Pemikiran tahap pertama (*Atomisme Logis*) terangkum dalam karyanya *Tractatus Logicus Philosophicus* yang menyuguhkan dalil-dalil yang sangat ketat sebagai sebuah pemikiran. Sedangkan pemikiran tahap ke dua termuat dalam karyanya *Philosophical Investigation*. Dalam tulisan ini terdapat pemikirannya tentang *Language Game* (Mustamsyir, 51) Kepustakaan pokok yang dipergunakan dalam tulisan ini memang bukan pustaka asli Wittgenstein dalam bahasa Jerman. Penulis berusaha menggunakan sumber buku dari penulis-penulis yang berkompeten yang ahli dalam penulisan filsafat Inggris-Jerman, yaitu Kees Bertens. Pemikiran dari tokoh lain seperti Austin dan pemikir lain juga dipergunakan dalam rangka menambah pemahaman dalam tulisan ini.

Tulisan ini adalah tulisan tentang masalah aktual dan faktual. Ada beberapa bidang yang tersangkut dalam tulisan ini yaitu: masalah filsafat, bahasa, dan politik. Masalah politik dalam hal ini menyangkut dua pengertian yaitu politik dalam arti umum maupun politik dalam konteks fenomena yang terjadi di percaturan politik Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi

terjadi perubahan sistem politik dan peta politik yang mendasar di Indonesia. Pertarungan kepentingan, kekuasaan dewasa ini semakin tajam. Di era demokrasi ini, rakyat sebagai pemilik suara merupakan sasaran tembak dari kekuatan-kekuatan politik. Semua kekuatan politik ini membutuhkan dukungan dari rakyat. Semua berusaha mencari dukungan sebesar-besarnya untuk membangun kekuatan maupun melangsungkan kekuasaan.

Jargon-jargon politik, slogan, pidato, pernyataan politik sering dilontarkan harus disikapi secara kritis, sehingga kita tidak terjebak dan tertipu. Berkaitan dengan masalah ini filsafat bahasa tidak membicarakan tentang bahasa itu sendiri, tetapi lebih mengacu apa yang ada di balik bahasa. Tulisan ini berusaha membangun sikap kritis dalam memahami bahasa politik, sehingga pernyataan tidak diterima sebagai mana apa adanya. Tulisan ini bisa menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahasa politik pada kurun waktu tertentu atau pada pemerintahan tertentu. Beberapa kasus yang di paparkan dalam tulisan ini hanya merupakan contoh-contoh untuk bahan analisa.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian singkat masalah aktual yang dipaparkan dalam gagasan konseptual. Tulisan ini mempunyai objek material

bahasa politik terutama bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi politik terutama dalam sistem demokrasi. Objek formal tulisan ini filsafat bahasa (analitik) Ludwig Wittgenstein Tahap 2. Dalam tulisan ini dipergunakan beberapa langkah metodis yaitu: (1) Deskripsi: yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa masalah mendasar yang menjadi perhatian dalam tulisan ini. Demikian juga hasil penelitian dideskripsikan secara secara jelas. (2) Interpretasi, yaitu melakukan interpretasi/penafsiran terhadap teori Wittgenstein dalam rangka melihat dan memahami bahasa politik. (3) Analisa-Sintesa, yaitu melakukan analisa secara cermat terhadap beberapa permasalahan, dicari penyebab pokok permasalahan dan hubungan beberapa hal tersebut. Dari beberapa analisa ini dibuat satu sintesa yang menghasilkan gambaran umum pembahasan dalam kerangka teori Wittgenstein. (4) Idealisasi, yaitu dengan memberikan suatu alternatif solusi terhadap permasalahan yang knya dilakukan. Alternatif solusi ini dupayakan suatu pemikiran yang ideal, namun dibahas. Alternatif ini bersifat normatif yang merupakan asumsi dasar yang selayaknya demikian.

B. BAHASA DALAM POLITIK

Permasalahan politik yang menyangkut kekuasaan, pengaturan kepentingan bersama merupakan masalah yang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena masalah politik selalu berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai kekuatan dimana semua mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Kompleksitas masalah ini juga disebabkan tingkat relativitas dan labilitas kebenaran (politis) yang sangat tinggi. Kebenaran politis sifatnya sangat subjektif dan relatif. Perbedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran sangat tipis. Sesuatu yang dianggap salah secara politis dengan mudah akan menjadi benar dalam perspektif pihak lain yang kemudian berkuasa. Muatan kepetingan lebih dominan dalam penentuan kebenaran atau kesalahan. Kebenaran politis lebih relatif dari pada kebenaran hukum, kebenaran ilmiah, dan kebenaran lain yang mempunyai tolok ukur yang jelas.

Politik bisa disejajarkan dengan seni, tidak ada sesuatu tidak bisa dikatakan pasti A atau pasti B. Politik lebih jauh juga merupakan seni yang melibatkan gaya dan bakat. Politik tidak hanya semata-mata adu kekuatan, tetapi bagaimana seni mengolah kekuatan sendiri maupun pihak lain. Politik sekaligus juga merupakan permainan. Permainan dalam politik ini

merupakan representasi manusia sebagai *homo luden* (binatang yang suka bermain). Olah raga ski bisa merupakan penggambaran gerak politik. Dalam olah raga ski dibutuhkan elastisitas yang tinggi agar bisa bergerak cepat, luwes menghindari dan menghadapi hambatan dan tantangan, sehingga bisa mencapai tujuan tepat pada waktunya.

Senjata yang dibutuhkan dalam dunia politik adalah diplomasi dan persepsi. Diplomasi dibutuhkan dalam hubungan horisontal sedangkan pembentukan persepsi dalam kaitannya dengan hubungan vertikal. Baik diplomasi maupun pembentukan persepsi membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini tidak hanya komunikasi verbal, tetapi juga komunikasi non verbal. Peranan bahasa sangat penting dalam politik sebagai media komunikasi. Bahasa (lama arti luas) yang tepat dibutuhkan dalam rangka diplomasi maupun pembentukan persepsi. Diplomasi dan pembentukan persepsi merupakan sarana untuk melicinkan jalan mencapai tujuan.

Dalam pandangan Yunani Kuno manusia dipandang sebagai *zoon logon echon*. Manusia adalah makhluk (binatang) yang berbicara, pengada yang memiliki *logos* (bahasa). (Sugiharto, 95) Yang membedakan manusia dengan binatang adalah bahasa. Manusia menggunakan

bahasa, sementara hewan hanya mengeluarkan suara atau bunyi. Bahasa selalu berkembang, sedangkan bunyi atau suara tidak. Munculnya bahasa menampilkan suatu transformasi mendasar dan total dari taraf kebinatangan ke taraf kemanusiaan. Bahasa merupakan kemampuan reflektif manusia. Berkat adanya bahasa manusia menjadi objek potensial bagi dirinya sendiri. Ia menjadi persoalan pokok pemahaman dirinya sendiri. Manusia bukanlah makhluk yang sudah tercetak sekali jadi secara natural melainkan produk kultural dalam konstruk linguistik (*idem*).

Bahasa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara pribadi maupun dalam hidup bersama. Kemampuan berbahasa sangat penting dalam pergaulan. Bahasa merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik, namun bahasa juga bisa menimbulkan konflik (Panggabean, xvii). Dalam masalah ini penggunaan bahasa dalam berpolitik membutuhkan seni tersendiri agar dapat bermain lincah. Politik itu sendiri merupakan suatu permainan dalam pertarungan. Dalam pertarungan ini aktor harus pandai memerankan peranannya. Bermain dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan.

Secara singkat alur hubungan manusia bahasa dan permainan adalah

sebagai berikut. Manusia pada hakekatnya adalah *homo luden* (binatang yang bermain), politik adalah permainan. Dalam permainan ini dibutuhkan sarana yaitu bahasa. Dalam terminologi Wittgenstein dalam penggunaan bahasa terdapat permainan bahasa. Penggunaan bahasa dalam politik dengan sendirinya merupakan permainan, yaitu permainan bahasa (*language games*). Sebagian besar tindakan manusia, termasuk tindakan politik dilakukakan lewat dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan. Dalam telaah ilmu politik bahasa menempati posisi penting terutama setelah munculnya postmodernisme dan poststrukturalisme dalam epistemologi modern. Bahasa dalam dirinya sendiri tampil sebagai representasi dari pagelaran (*deployment*). Bahasa pada akhirnya dipahami sebagai salah satu space suatu ruang dimana konflik berbagai kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan *counter-hegemony* terjadi (Hikam, 179).

Bahasa tidak lagi dipahami sebagai medium netral yang berada di luar pembicara. Apabila dikaitkan dengan wacana politik bukan alat atau medium netral, melainkan merupakan representasi dirinnya dalam hubungan-hubungan politis tetapi merupakan ruang bagi pertarungan kuasa-kuasa tertentu (Hikam, 186-187). Pandangan ini menentang pandangan

sebelumnya yang berasumsi bahwa bahasa itu netral sebagaimana pandangan kelompok lingkaran Wina seperti penganut Positivisme Logis dan Atomisme logis (pandangan Wittgenstein tahap I). Bahasa lewat struktur logis mampu menggambarkan realitas dan makna tidak lain daripada penggambaran suatu keadaan faktual dalam realitas melalui bahasa (Bertens, 43). Sebagaimana pemikiran filsuf-filsuf lingkaran Wina menggunakan landasan logis untuk menyusun suatu pemahaman dan kebenaran yang pasti. Wittgenstein mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan logika bahasa, dengan konsepnya tentang teori gambar (*picture theory*) dan *state of affair*.

Pemikiran Wittgenstein tahap I ini pada akhirnya dikoreksi oleh pemikitan tahap II. Ia menolak terutama dalam tiga hal yang dulu menjadi landasan pemikiran tahap I. Pertama, bahwa bahasa dipakai hanya untuk satu tujuan saja yaitu menetapkan *state of affair*. Kedua, bahwa kalimat-kalimat mendapatkan maknanya dengan satu cara saja yaitu menggambarkan suatu keadaan faktual. Ketiga, setiap jenis bahasa dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna, biarpun pada pandangan pertama barangkali sukar untuk dilihat (Bertens, 48). Dalam *Philosophical Investigation* Wittgenstein memperkenalkan istilah *language games*

(permainan bahasa). Suatu permainan dapat dilukiskan sebagai aktivitas dilakukan menurut aturan tertentu (Bertens, 49). Setiap bidang mempunyai aturan sendiri. Menurut Wittgenstein makna sebuah kata adalah tergantung penggunaannya dalam suatu kalimat, adapun makna kalimat adalah tergantung penggunaannya dalam bahasa, sedangkan makna bahasa adalah tergantung penggunaannya dalam hidup (Kaelan, 149)

Pada pemikiran tahap II terlihat jelas unsur relativitas bahasa. Tingkat relativitas dan subjektifitas dalam bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik sangat tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa di bidang lain. Hal ini tidak ada aturan yang mengatur dalam penggunaan bahasa politik. Di samping itu dalam politik sarat dengan kepentingan, motif, dimana tujuan komunikasi menjadi utama. Pameo bahwa *dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi* merupakan suatu yang tidak berlebihan.

Bahasa politik membawa ideologinya sendiri yaitu kepentingan penuturnya. Bahasa politik seringkali berwayuh arti (*multi interpretations*), *ambiguous*, bahkan menipu. Apa yang terjadi bisa jadi merupakan apa yang sebaliknya dari yang diungkapkan. Bahasa politik tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi juga untuk

menyembunyikan sesuatu. Hal ini senada dengan peribahasa Perancis yang berbunyi: "*La parole a ete donne a l'homme pour deguiser sa pensee*" bahasa diberikan kepada manusia untuk menyembunyikan pikirannya. Versi lain peribahasa tersebut berbunyi: "*Les paroles sont faites pour cacher nos pensees*", bahasa-bahasa dibuat untuk menyembunyikan pikiran kita (Panggabean, vii). Para tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapat atau pikirannya, melainkan untuk menyembunyikannya. Ia harus menyembunyikan pikirannya karena ada kepentingan yang harus dipertahankan yang selayaknya tidak diketahui orang lain.

Semua orang yang melancarkan aksi berbahasa politik cenderung (untuk tidak mengatakan selalu) memanipulasi proses kerjasama dan menggiring pendengarnya untuk menyetujui sesuatu hal yang menurutnya paling benar dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk mempertanyakan kebenaran itu (Purwoko, 13). Bahasa politik tidak mementingkan *state of fact* tetapi lebih mementingkan implikasi dari suatu pernyataan. Seorang politikus yang hati-hati akan menggunakan kalimat yang bersayap dimana pendengar tergiring untuk membuat kesimpulan seperti apa yang dimaksudkan walaupun apa yang

diucapkan belum tentu benar dari segi fakta (Purwoko, 13). Berkaitan dengan hal ini Austin mengatakan bahwa tindakan bahasa (*speech Act*) terdiri dari tiga hal: yaitu tindakan lokusi (*locutionary act*) yaitu apa yang diucapkan penutur, tindakan ilokusi (*illocutionary act*) adalah makna atau arti di balik suatu pernyataan, dan tindakan perlokusi (*perlocutionary act*) yaitu dampak dari apa yang diucapkan penutur.

Bahasa politik lebih mementingkan tindakan perlokusi yaitu dampak dari suatu ucapan. Dalam hal ini sikap kritis sangat dibutuhkan dalam memahami bahasa politik. Menurut Wilson yang juga dikutip Herudjati mengatakan bahwa ada yang khas dari bahasa politik yaitu menyentuh perasaan (*emotive*). Bahasa politik ini mengandung empat argumentasi: pertama *correct interpretation* (pendengar atau pembaca harus menginterpretasikan bahwa apa yang dinyatakan penutur selalu benar), kedua *exception*, bahwa apa yang diucapkan harus diterima oleh pendengaran sebagai kekecualian yang sudah benar dan tidak perlu dikritisi, ketiga *chauvinism*, yang diajukan bukan fakta kebenaran tetapi point maksud/tujuan yang sesekali kelihatan arogan, kalau perlu dengan kata bersayap (*doubletalk*), keempat *controlled cognitive environment*, yaitu premis dari wacana politik bukan memberikan pesan melainkan menciptakan lingkungan

kognitif bagi pendengar agar memiliki interpretasi seperti yang telah direkayasa (Purwoko, 17).

C. PERMAINAN BAHASA DALAM SISTEM DEMOKRASI

Di atas telah diuraikan bagaimana model dan pola-pola bahasa yang digunakan dalam politik. Dalam perpektif Wittgenstein, bahasa yang digunakan dalam politik mengandung unsur permainan. Bermain di sini adalah bermain dengan kata-kata. Selayaknya sebuah permainan orang harus memilih kata yang tepat, mengatur strategi bahkan harus berpura-pura, kapan menyerang, kapan mengalah yang terbungkus dalam kamufase sehingga tampak seperti memenuhi aturan. Sistem politik (baca pemerintahan) mengalami perkembangan yang sangat beragam terutama setelah dunia Barat memasuki zaman *Aufklarung* yang merupakan pintu gerbang memasuki zaman modern. Pada zaman romantisme sistem yang umum berlaku adalah monarkhi, oligarkhi. Demokrasi mulai berkembang setelah memasuki zaman modern bersamaan dengan sistem-sistem lama yang masih berjalan, termasuk sistem pemerintahan diktator.

Di antara beberapa sistem politik yang berjalan, sistem demokrasilah yang paling banyak menggunakan unsur permainan dalam penggunaan bahasa yang

dalam istilah Wittgenstein *Language Games*. Permainan dalam bahasa politik ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang negative atau positif. Permainan ini selayaknya dilihat sebagai suatu fakta yang terjadi dalam fenomena pelaksanaan demokrasi yang harus disikapi secara cerdas dan kritis. Permainan bahasa dalam politik (untuk selanjutnya baca: demokrasi) adalah suatu kebutuhan.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan, memiliki suara. Kekuasaan ini akan didelegasikan, diwakilkan, diberikan kepada pihak lain. Di awal proses politik terjadi transaksi antara rakyat pemilik kuasa dengan yang mewakili pemilik kuasa. Pihak yang mewakili baik perorangan maupun lembaga membutuhkan dukungan rakyat, semakin banyak dukungan diperoleh semakin baik. Komunikasi politik yang intens perlu dilakukan. Disinilah peran bahasa sangat penting sebagai media komunikasi untuk meyakinkan, mengambil hati, menarik simpati agar rakyat memberikan suaranya.

Bahasa dalam hal ini mempunyai dua fungsi penting: pertama fungsi persuasi, kedua fungsi mengancam. Bahasa menjalankan fungsi persuasi jika bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah sikap audiens seperti apa yang diinginkannya. Bahasa

yang digunakan dalam pidato, ceramah, kampanye merupakan selubung bagi suatu kepentingan. Penutur harus pintar bermain memilih bahasa yang tepat agar bisa mempengaruhi orang lain. Dengan bahasa yang tepat penutur akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menyamakan pikiran atau ide. Ada suatu istilah menyamakan “bahasa” yang artinya menyamakan persepsi, menyatukan persepsi. Janji-janji atau pidato yang indah dan ideal sering dilontarkan untuk mencapai tujuan. Pada masa kampanye banyak sekali muncul statemen yang pantas diragukan kebenarannya yang membuat bingung orang banyak. Dalam terminologi Austin tindakan berbahasa ini disebut tindakan perlokusi, yaitu pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh isi pernyataan. Di sini terkandung unsur kesengajaan dari penutur untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal melalui tuturan yang dilontarkan, (Mustamsyir, 118-119)

Bahasa juga mempunyai fungsi mengancam. Dalam politik internasional dikenal berberapa jenis ancaman dengan bahasa tersendiri: *deterrent policy* (siasat menakutkan), pembalasan secara masif (*massive retaliation*), siasat tepi jurang (*escalation policy*), siasat untuk melakukan serangan ke dua (*second-strike capability policy*), siasat untuk mencapai keseimbangan teror (*balance of terror*)

policy) (Panggabean, ix). Bahasa yang digunakan baik persuasif maupun bahasa mengancam pada dasarnya untuk mengamankan kepentingan penutur. Dalam politik penutur sering terkondisi dalam situasi dimana ia harus melakukan kebohongan, menutupi sesuatu merupakan suatu siasat mengalahkan pihak lain.

Seorang empiris Inggris Thomas Hobbes mengajukan keberatan penting tentang demokrasi. Demokrasi selalu membutuhkan retorika. Retorika hanya mengutamakan “efek” bukan isi. Retorika mengakibatkan keputusan yang ditentukan oleh penyalahgunaan pikiran (*impetus animi*) dari pada penalaran yang benar (*recta ratione*) (Sugiharto, 116-117). Retorika memburu kemenangan daripada kebenaran, sehingga bahasa yang digunakan mempunyai efek persuasi yang berfungsi pragmatis mempengaruhi pendengarnya

Hal ini terjadi bukan semata-mata kesalahan penutur. Dalam kenyataannya orang yang tidak bersikap kritis karena keterbatasannya mudah terbius dengan orasi yang memukau sehingga melupakan apa yang diungkapkan itu benar atau salah. Dunia politik memang tidak dapat dipahami semata-mata secara rasional. Terdapat unsur-unsur lain yang dominan dalam kehidupan politik, seperti ideologi, emosi, psikologi, komunikasi dan juga

personifikasi. Politik baik dalam skala besar maupun kecil selalu berkaitan dengan kepentingan. Sebagaimana kata Jurgen Habermas bahwa bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan selalu membangun bahasanya sendiri untuk mengamankan bahkan memperbesar kekuasaannya. Hal ini senada dengan para penganut Max Weber yang memandang bahwa inti kekuasaan adalah dominasi, yaitu menguasai siapa saja dan apa saja dengan segala cara. Mereka yang dikuasai berada dalam subordinasi dari yang berkuasa (Sugiharto, 45).

Permainan bahasa dalam komunikasi politik adalah suatu kebutuhan. Sejauh mana permainan ini dilakukan oleh para aktor-aktor politik tergantung dari seberapa besar ketergantungan pada pihak lain atas kekuasaannya. Suatu kekuasaan semakin tergantung pada pihak lain (dukungan rakyat) semakin akan semakin besar melakukan permainan bahasa. Pada negara dengan sistem monarki di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun lebih menggunakan bahasa yang lugas, apa adanya tanpa harus banyak menyampaikan kebohongan-kebohongan dalam menyampaikan informasi. Demikian juga sistem pemerintahan dictator, mereka tidak mau sibuk dengan

permainan bahasa. Mereka membangun kekuasaan tidak lewat persuasi tetapi lewat kekuatan.

Sebaliknya dalam pemerintahan demokrasi atau pemerintahan yang mengecap dirinya demokrasi intensitas permainan bahasa sangat tinggi. Pemerintahan semacam ini dibutuhkan kemampuan permainan bahasa yang sangat tinggi. Permainan ini dibutuhkan dalam rangka mengalang simpati, meraih dukungan, meyakinkan dan mempengaruhi orang sehingga orang percaya dan tunduk pada kemauan penguasa. Dalam pemerintahan demokrasi pembentukan citra kadangkala lebih penting dari pada tindakan nyata. Upaya membentuk kesan ini bisa dianalogkan dengan sebuah iklan parfum yang berbunyi “Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda”. Dalam dunia politik fenomenanya berbunyi “Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah saya setelah berkuasa”.

Di bagian akhir tulisan ini ada baiknya kita tengok praktek gaya bahasa beberapa presiden Indonesia dalam komunikasi politiknya. Pertama pemerintahan Soekarno. Pada kurun waktu ini walaupun ada beberapa unsur-unsur pemerintahan demokrasi, tetapi pada dasarnya pemerintahan ini adalah pemerintahan otoriter. Gaya berbahasa Soekarno itu lugas (*to the point*), terbuka,

komunikatif (suka humor), apa adanya, luwes, otoriter. Dalam berkomunikasi terkesan alami dan apa adanya. Ia tidak perduli apakah dicap demokratis apa tidak, ia tidak mepedulikan citra, yang terpenting adalah mengusung idealisme. Gaya bicaranya yang bombastis, mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Ia tidak takut adanya musuh-musuh dari gaya keterbukaannya, walaupun musuh itu negara besar seperti Amerika.

Yang kedua pemerintahan Soeharto. Pemerintahan ini secara yuridis-formal adalah pemerintahan demokratis, tetapi secara substansial tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya pemerintahan ini bersifat otoriter, namun berusaha menampilkan sosok wajah demokratis. Kebijakan-kebijakan otoriternya dikemas dalam dalam koridor hukum, sehingga segala kebijakannya secara formal tidak melanggar hukum, namun secara substansial tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan rasa keadilan. Gaya berbahasa Soeharto tertutup, santun, halus, tidak *to the point*, simbolis, terkendali, formal. Beberapa istilah dipergunakan untuk memoles beberapa kebijakan pemerintah otoriternya. Istilah *diamankan* untuk menunjuk pada tindakan menangkap musuh-musuh politiknya. Tuduhan *tindakan subversif* dikenakan pada orang-

orang yang membahayakan kekuasaannya walaupun kekuatannya sangat kecil. *Masa mengambang* dipakai untuk mobilisasi masa untuk kemenangan pemilu. Istilah *pembangunan* menggantikan program yang sarat kepentingan kelompok tertentu, dan masih banyak lagi istilah lain. Presiden B.J. Habibie menampilkan gaya berbahasa yang terbuka, meledak-ledak kadang tidak terkontrol, *to the point*.

Abdurahman Wakhid menampilkan gaya berbahasa yang santai kadang seenaknya, terbuka, *to the point*, mempunyai selera humor, otoriter. Sementara Megawati lebih menampilkan bahasa tubuh (tersenyum, menggeleng, mengangkat bahu), tidak banyak berkomentar, *to the point*, kurang komunikatif. Dalam beberapa kesempatan ia memilih diam. Kekurangmampuan berkomunikasi ini menjadi salah satu sebab orang meragukan kapasitasnya sebagai presiden. Anggapan ini ternyata tidak tepat, ketika pilihan dijatuhkan pada sosok yang komunikatif dan kadang terlalu banyak omong ternyata permasalahan justru banyak muncul. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan gaya berbahasa yang santun, halus, terkendali, tidak *to the point*, menyentuh perasaan, formal. Ia berusaha membangun citra yang baik, sangat menghindari konflik dan musuh. Menghindari kesalahan persepsi dengan menggunakan kalimat bersayap

Demikianlah gaya berbahasa beberapa presiden Indonesia menurut analisa penulis. Kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan, juga tidak ditentukan kepandaian seorang menarik simpati lewat kemampuannya berkomunikasi, tetapi ditentukan oleh hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat.

E. PENUTUP

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa. Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal. Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik. Di dalam penggunaan bahasa politik terdapat permainan bahasa. Di antara berbagai sistem politik sistem demokrasilah yang paling banyak membutuhkan permainan bahasa. Dalam demokrasi pemilik suara adalah rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat ini berusaha mencari simpati dan kepercayaan untuk menyerahkan kewenangannya. Dalam hal ini diperlukan bahasa persuasif untuk meyakinkan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton dan Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, Kees. 1983. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Hikam, AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Kaelan. 1998. *Filsafat Bahasa, Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mustamsyir, Rizal. 1987. *Filsafat Analitik: Sejarah dan Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panggabean, Maruli. 1981. *Bahasa Pengaruh dan Peranannya*. Jakarta: Gramedia.
- Purwoko, Herudjati. 2011. *Kaitan Bahasa dan Politik dalam Perspektif Budaya*. Makalah dalam Seminar Nasional FIB UNDIP, Semarang.
- Sugiharto, Bambang. 1996. *Postmodernisme: Suatu Tantangan dalam Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.